



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) PADA BAKORWIL V JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh
Bramantio Putra Dikansa
NIM 130810101118

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) PADA BAKORWIL V JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Bramantio Putra Dikansa
NIM 130810101118

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Siti Amalia, Ayahanda (Alm) Dodik Aries Yanto, dan Ayahanda Buhadi Sunar Wibowo tercinta yang senantiasa dengan tulus memberikan doa, semangat dan nasehat dalam setiap perjalanan demi mencapai kesuksesan:
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan tinggi terhormat, yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing dengan sepuh hati:
3. Adikku Olifianti Irfani Dewi, dan Anis Zarifah Rahmah yang selalu mendukung dan menghibur:
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

(Qs. An-Najm 39-41)

“Kita menilai diri kita dengan mengukur dari apa yang kita rasa mampu untuk kerjakan, orang lain mengukur kita dengan mengukur dari adab yang telah kita lakukan”

(Henry Wadsworth Longfellow)

“Usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah”

(Napoleon Hill)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bramantio Putra Dikansa

NIM : 130810101118

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Bakorwil V Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali didalam pengamatan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 November 2017
Yang menyatakan,

Bramantio Putra Dikansa
NIM. 130810101118

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PADA BAKORWIL V JAWA TIMUR**

Oleh :

Bramantio Putra Dikansa
NIM 130810101118

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Aisah Jumiati, S. E., M. P

Dosen Pembimbing II : Dr. Moh. Adenan, M.M

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Bakorwil
V Jawa Timur
Nama Mahasiswa : Bramantio Putra Dikansa
NIM : 130810101118
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 09 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Aisah Jumiati S.E, M.P
NIP. 19680926 199403 2 002

Dr. Moh. Adenan M.M
NIP. 19661031 199203 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin. M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PADA BAKORWIL V JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bramantio Putra Dikansa

NIM : 130810101118

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 November 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Endah Kurnia Lestari, S. E., M. E (.....)
NIP. 19780414 200112 2 003
2. Sekretaris : Dr. M. Fathorrazi, S. E., M. Si (.....)
NIP. 19630614 199002 1 001
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santosa, S. E., M. Si (.....)
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 X 6

warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak.,CA
NIP. 19710727 199512 1 001

Analisis Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Bakorwil V Jawa Timur

Bramantio Putra Dikansa

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan dampak perubahan pada arah pembangunan maupun keuangan daerah. Dalam hal keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut agar mampu mengelola keuangan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Bakowril V Jawa Timur, serta untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan PAD dan rasio efisiensi belanja daerah serta analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang terdiri dari data time series selama tahun 2003 sampai 2015 dan data cross section 7 kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan diketahui bahwa rasio kemandirian tergolong dalam kategori rendah sekali, rasio desentralisasi tergolong dalam kategori sangat kurang, rasio efektifitas tergolong dalam kategori sangat efektif, rasio pertumbuhan PAD yang berkisar 19 sampai 25 persen dan rasio efisiensi belanja sudah tergolong efisien. Dari hasil regresi data panel disimpulkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan. Secara parsial variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan.

Kata kunci: kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, PDRB

Financial Performance Analysis And Its Influence To Gross Regional Domestic Product (GRDP) In Bakorwil V East Java

Bramantio Putra Dikansa

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

The enactment of regional autonomy has an impact change in the direction of development and regional finance. In terms of regional finance, local governments are required to be able to manage regional finance. The ability of regional financial management can be seen from the financial performance of the region which will ultimately impact on the welfare of society and the regional economy. The purpose of this research is to analyze the financial performance of regency / city government in Bakowril V East Java, and to know the influence of local revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and capital expenditure on Gross Regional Domestic Product (GRDP). The analysis method used is descriptive analysis of regional financial performance consisting of independence ratio, decentralization ratio, effectiveness ratio, PAD growth ratio and ratio of efficiency of regional spending and panel data regression analysis with Fixed Effect Model (FEM) approach, consisting of time series data during 2003 to 2015 and cross section data 7 districts / cities in Bakorwil V East Java. Based on the results of financial performance analysis known that the independence ratios are categorized as very low, the decentralization ratios are categorized as very poor, the effectiveness ratios are categorized as very effective, the PAD growth ratio is 19 to 25 percent and the ratio of efficiency of regional spending is efficient. From result of regression of panel data concluded that simultaneously variable of PAD, DAU, and capital expenditure have positive and significant influence. Partially, PAD and DAU variable have positive and significant influence, while capital expenditure has negative and insignificant effect.

Keywords: *financial performance, local revenue, general allocation fund, capital expenditure, GRDP*

RINGKASAN

Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Bakorwil V Jawa Timur; Bramantio Putra Dikansa, 1308101011118; 2017: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Oleh sebab itu sejak 1 Januari 2001 mulai diberlakukan otonomi daerah. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan di daerahnya sehingga kedudukan daerah dalam perencanaan daerah semakin penting. Dalam upaya peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai dengan menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan daerah. Menurut Kaho (1998) aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria guna mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, dimana apabila kinerja keuangan daerah dinyatakan baik, maka daerah tersebut memiliki kemampuan untuk pembiayaan pelaksanaan urusan daerah dalam otonomi daerah.

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah, apabila penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara baik, efektif dan efisien dimana memenuhi prinsip *value of money* serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel maka akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Lucky (2011) mengatakan bahwa penerimaan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena penerimaan daerah digunakan untuk menopang pengeluaran daerah dan

melalui pengeluaran daerah tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya permasalahan dalam penelitian ini merujuk pada kinerja keuangan daerah serta keuangan yang baik dalam pelaksanaan otonomi pada pemerintah daerah yang nantinya akan mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan perkonomian daerah (PDRB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur tahun 2003-2015 serta untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif dengan memakai data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan tinjauan berbagai literatur. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio efisiensi belanja daerah serta analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), yang terdiri dari data *time series* selama tahun 2003 sampai 2015 dan data *cross section* 7 kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kinerja keuangan daerah pada Bakorwil V Jawa Timur selama kurun waktu 2003 sampai 2015, diketahui bahwa rasio kemandirian masih tergolong rendah dengan rata-rata rasio kemandirian berkisar pada 7,41 sampai 13,05 persen dan memiliki pola hubungan instruktif. Rasio desentralisasi masih tergolong sangat kurang dimana rata-rata rasio desentralisasi berkisar pada 6,63 persen sampai 10,87 persen. Rasio efektifitas sudah tergolong sangat efektif dimana rata-rata rasio efektifitas berkisar pada 101,74 sampai 116,10 persen. Rasio pertumbuhan PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 19,67 persen sampai 25,76 persen, dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun memiliki kecenderungan kenaikan PAD setiap tahunnya. Rasio efisiensi belanja daerah sudah tergolong efisien karena memiliki nilai rasio dibawah 100 persen dengan rata-rata rasio efisiensi belanja daerah berkisar pada 89,03 sampai 93,27 persen.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel model *Fixed Effect Model* (FEM) secara simultan variabel PAD, DAU, dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Secara parsial variabel PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,988265. artinya variasi PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur mampu dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan belanja modal sebesar 98,82 persen, sedangkan sisanya 1,18 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

PRAKATA

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Bakorwil V Jawa Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
3. Aisah Jumiati S.E, M.P selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Moh. Adenan, M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Teguh Hadi Priono, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu dan Studi Pembangunan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Staf Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang telah banyak membantu selama ini;

8. Ibunda Siti Amalia, Ayahanda Dodik Aries Yanto (alm.), dan Ayahanda Buhadi Sunar Wibowo, yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;
9. Adikku tercinta, Olifianti Irfani Dewi dan Anis Zarifah Rahma yang selalu memberi do'a, semangat, dan selalu menghibur setiap waktu;
10. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah kuanggap sebagai keluarga, Gilang, Noval, Kenit, Ulan, Ima, Tyas, Rossi, yang selalu memberikan semangat, motifasi serta dukungan penuh;
11. Teman-teman seperjuangan Agam, Suci, Nourmala, Arif, Topan, Winda, Magda, Wulan, Lina, Hendra, dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik ilmu maupun motivasi sehingga terselesaikannya tugas akhir ini;
12. Teman-teman Jurusan IESP 2013 khususnya konsentrasi regional, yang telah memberikan segala bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi;
13. Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan penulis;
14. Keluarga KKN 108 Desa Pelalangan Kabupaten Bondowoso;
15. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, dukungan, do'a dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini dan harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 1 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Konsep Otonomi Daerah.....	10
2.1.2 Desentralisasi Fiskal.....	12
2.1.3 Keuangan Daerah	13
2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah	15
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi.....	16

2.1.6	Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	20
2.3	Kerangka Konseptual	28
2.4	Hipotesis Penelitian	29
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Metode Analisis Data	32
3.4.1	Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan Daerah	32
3.4.2	Analisis Regresi Data Panel	36
3.4.3	Uji Spesifikasi Model	38
3.4.4	Uji Statistik.....	40
3.4.5	Uji Asumsi Klasik	43
3.5	Definisi Operasional Variabel	46
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1	Gambaran Umum.....	47
4.1.1	Keadaan Geografis Bakorwil V Jawa Timur	47
4.1.2	Gambaran Penduduk Setiap Kabupaten/Kota.....	51
4.1.3	Gambaran Perekonomian Setiap Kabupaten/Kota	58
4.1.4	Gambaran Keuangan Daerah Setiap Kabupaten/Kota	65
4.1.5	Gambaran Akselerasi APBD Dan PDRB	86
4.2	Analisis Data	87
4.2.1	Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan	87
4.2.2	Analisis Regresi Data Panel	92
4.2.3	Uji Statistik	98
4.2.4	Uji Asumsi Klasik	101
4.3	Pembahasan	105
4.3.1	Kinerja Keuangan Daerah	105
4.3.2	Pengaruh PAD, DAU dan Belanja Modal Terhadap PDRB	108
BAB 5.	PENUTUP.....	115

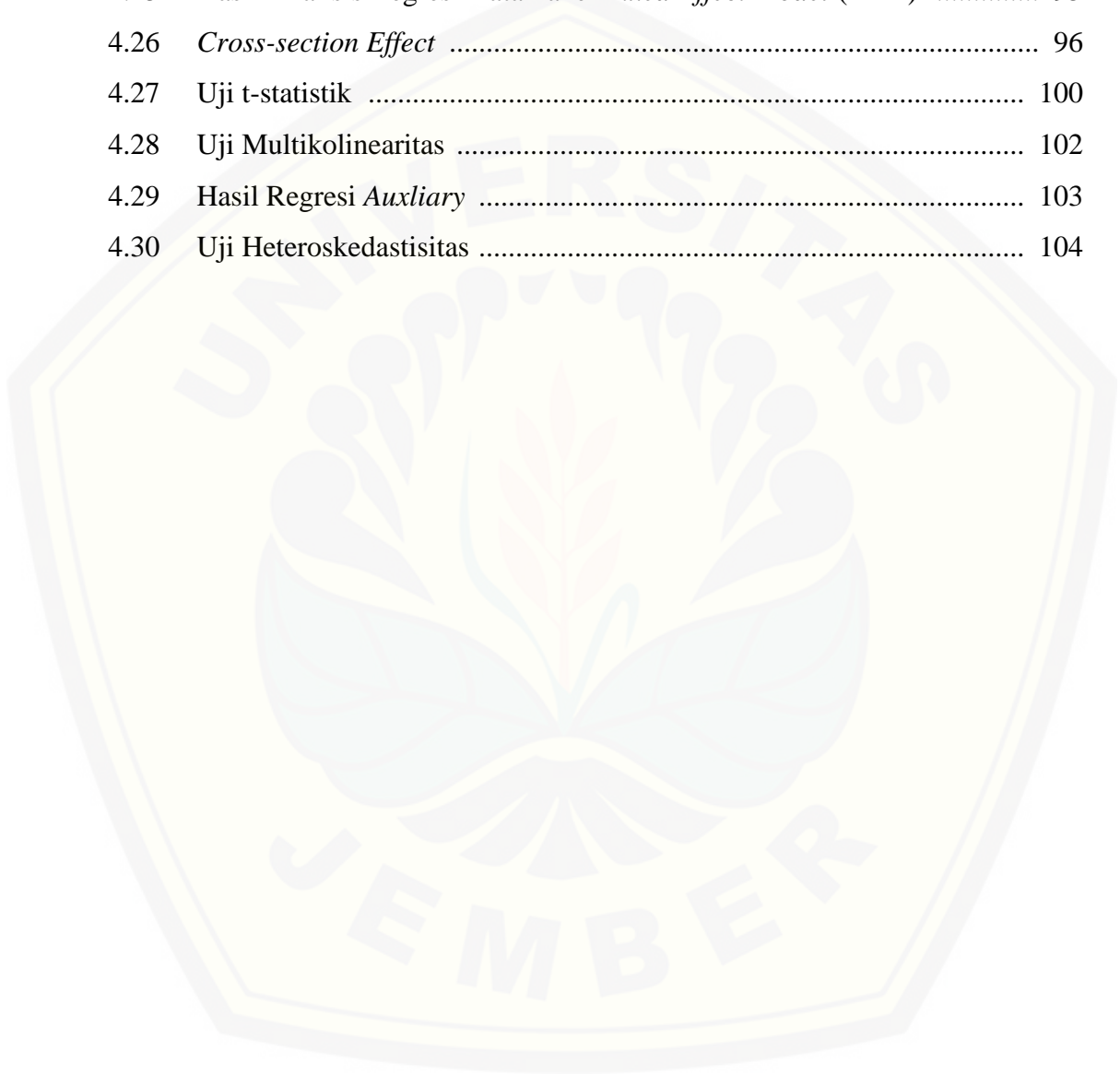
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	126



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Bakorwil di Jawa Timur Tahun 2011 – 2015 (persen)	5
2.1 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian	33
3.2 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi	34
3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas	35
3.4 Kriteria Pengujian Durbin Watson	45
4.1 Pembagian Bakorwil di Jawa Timur	47
4.2 Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 – 2015	51
4.3 Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2003 – 2015	52
4.4 Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2015	53
4.5 Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2003 – 2015	54
4.6 Penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2003 – 2015	55
4.7 Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2003 – 2015	56
4.8 Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2003 – 2015	57
4.9 PDRB Kabupaten Banyuwangi AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	58
4.10 PDRB Kabupaten Bondowoso AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	59
4.11 PDRB Kabupaten Jember AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	60
4.12 PDRB Kabupaten Lumajang AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	61
4.13 PDRB Kabupaten Probolinggo AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	62
4.14 PDRB Kabupaten Situbondo AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	63
4.15 PDRB Kota Probolinggo AHK 2000 Tahun 2003 – 2015	64
4.16 Besaran Stimulus APBD Terhadap PDRB Tahun 2015	86
4.17 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian (persen)	88
4.18 Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi (persen)	89
4.19 Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas (persen)	90
4.20 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD (persen)	91

4.21	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah (persen)	92
4.22	Perbandingan Estimasi Data Panel Model PLS, FEM dan REM	93
4.23	Hasil Uji Chow	94
4.24	Hasil Uji Hausman	95
4.25	Hasil Analisis Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	95
4.26	<i>Cross-section Effect</i>	96
4.27	Uji t-statistik	100
4.28	Uji Multikolinearitas	102
4.29	Hasil Regresi <i>Auxiliary</i>	103
4.30	Uji Heteroskedastisitas	104



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Setiap Bakorwil di Jawa Timur Tahun 2010 – 2015	4
1.2 Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2010 – 2015	6
1.3 Realisasi Penerimaan DAU Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2010 – 2015	7
1.4 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2010 – 2015	8
2.1 Kerangka Konseptual	28
3.1 Statistik Durbin-Watson	45
4.1 Peta Wilayah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur	48
4.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 – 2015	66
4.3 Komponen PAD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 – 2015	67
4.4 DAU Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 – 2015	68
4.5 Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2003 – 2015	68
4.6 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2003 – 2015	69
4.7 Komponen PAD Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2003 – 2015	70
4.8 DAU Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2003 – 2015	71
4.9 Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2003 – 2015	71
4.10 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2015	72
4.11 Komponen PAD Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2015	73

4.12	DAU Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2015	73
4.13	Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2015	74
4.14	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2003 – 2015	75
4.15	Komponen PAD Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2003 – 2015	75
4.16	DAU Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2003 – 2015	76
4.17	Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2003 – 2015	77
4.18	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003 – 2015	78
4.19	Komponen PAD Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003 – 2015	78
4.20	DAU Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003 – 2015	79
4.21	Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003 – 2015	80
4.22	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 – 2015	80
4.23	Komponen PAD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 – 2015	81
4.24	DAU Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 – 2015	82
4.25	Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 – 2015	82
4.26	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2003 – 2015	83
4.27	Komponen PAD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2003 – 2015	84
4.28	DAU Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2003 – 2015	85
4.29	Total Pengeluaran dan Belanja Modal Penerimaan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2003 – 2015	85
4.30	Uji Normalitas	101

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A	Komponen PAD 126
B	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan 129
C	Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi 133
D	Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas 137
E	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD 141
F	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah 145
G	Data Regresi Panel 149
H.1	Hasil Uji Chow 151
H.2	Hasil Uji Hausman 152
I.1	Hasil Regresi Data Panel <i>Pooled Least Square</i> 153
I.2	Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> 153
I.3	Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> 154
J	Hasil Uji Normalitas 154
K	Hasil Uji Multikolinearitas 155
L.1	Hasil Uji Regresi <i>Auxiliary</i> Variabel Dependen PDRB 155
L.2	Hasil Uji Regresi <i>Auxiliary</i> Variabel Dependen PAD..... 156
L.3	Hasil Uji Regresi <i>Auxiliary</i> Variabel Dependen DAU..... 157
L.4	Hasil Uji Regresi <i>Auxiliary</i> Variabel Dependen Belanja Modal 157
M	Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser..... 158
M	Hasil Uji <i>Cross-section Effect</i> 158

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Diharapkan dengan diberlakukannya pembangunan di daerah akan melatih kemandirian daerah dalam pembangunan daerah. Untuk menciptakan suatu pembangunan daerah yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, pemerintah menetapkan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan republik dan terbagi atas beberapa wilayah yang bersifat otonom. Penetapan ini tercermin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 1, dimana disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945).

Pada pertengahan 1998 terdapat tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah serta tuntutan pelaksanaan *good governance*, mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Wenny, 2012). Lebih lanjut pencanangan otonomi daerah mulai digalakkan sejak 1 Januari 2001. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan di daerahnya sehingga kedudukan daerah dalam perencanaan daerah semakin penting.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan

pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, turut membantu meningkatkan potensi yang terdapat di daerah otonom secara nyata dan optimal dan mengurangi beban dari pemerintah pusat. Dalam upaya peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai dengan menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki tiap daerah (Sholikhah, 2011).

Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Kaho (1998) aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria guna mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, kemampuan daerah yang dimaksud berupa seberapa jauh pemerintah daerah menggali sumber keuangan guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat (Rizkiano, 2011).

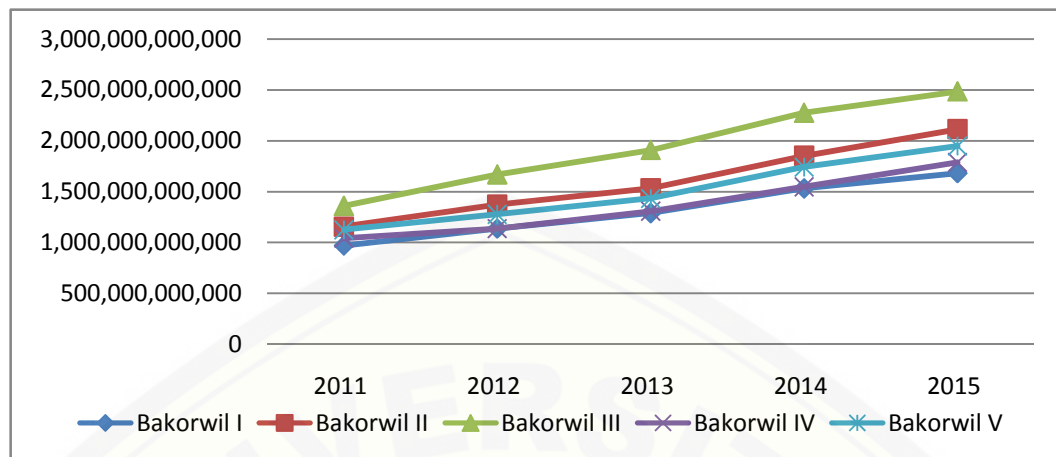
Berkenaan dengan pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah, apabila penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara baik, efektif dan efisien dimana memenuhi prinsip *value of money* serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel maka akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Khakim, 2011). Kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, dimana apabila kinerja keuangan daerah dinyatakan baik, maka daerah tersebut memiliki kemampuan untuk pembiayaan pelaksanaan urusan daerah dalam otonomi daerah. Apabila realisasi PAD masih tergolong kecil dan masih belum mencukupi pembiayaan daerah maka menandakan bahwa rasio keuangan daerah tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya rasio

keuangan ini mengindikasikan kinerja keuangan daerah tersebut juga rendah karena masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan daerah sehingga perlu langkah strategis guna peningkatan PAD (Prawoto, 2014).

Bakorwil Jawa Timur merupakan perubahan akan pembagian wilayah yang sebelumnya bernama karesidenan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, membagi wilayah kerja koordinasi di Jawa Timur menjadi 5 bagian koordinasi wilayah yang terdiri dari:

1. Bakorwil I berkedudukan di Kabupaten Madiun terdiri dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kota Madiun dan Kota Kediri.
2. Bakorwil II berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, dan Kota Mojokerto.
3. Bakorwil III berkedudukan di Kota Malang terdiri dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Batu, Kota pasuruan dan Kota Surabaya.
4. Bakorwil IV berkedudukan di Kabupaten Pamekasan terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.
5. Bakorwil V berkedudukan di Kabupaten Jember terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kota Probolinggo.

Secara umum, kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Dalam sisi penerimaan, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah mampu meningkatkan pendapatannya. Untuk melihat kondisi penerimaan pemerintah kabupaten/kota disetiap bakorwil di Jawa Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.1 Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Setiap Bakorwil di Jawa Timur Tahun 2011-2015

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota BPS, 2017. *Data diolah*

Gambar 1.1 menjelaskan penerimaan pemerintah kabupaten/kota pada setiap bakorwil di Jawa Timur tahun 2011 sampai 2015. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah kabupaten/kota di setiap bakorwil Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, penerimaan pemerintah kabupaten/kota tertinggi diduduki oleh Bakorwil III dengan rata-rata penerimaan Rp. 2.483.978.668.667,- . Bakorwil II penempati posisi kedua dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 2.112.361.069.625,- , disusul Bakorwil V dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 1.946.580.345.217,- , Bakorwil IV dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 1.785.853.056.500,- , dan terendah Bakorwil I dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp. 1.680.793.560.500,-.

Lucky (2011) mengatakan bahwa penerimaan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena penerimaan daerah digunakan untuk menopang pengeluaran daerah dan melalui pengeluaran daerah tersebut dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana laju pertumbuhan PDRB pada setiap Bakorwil di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

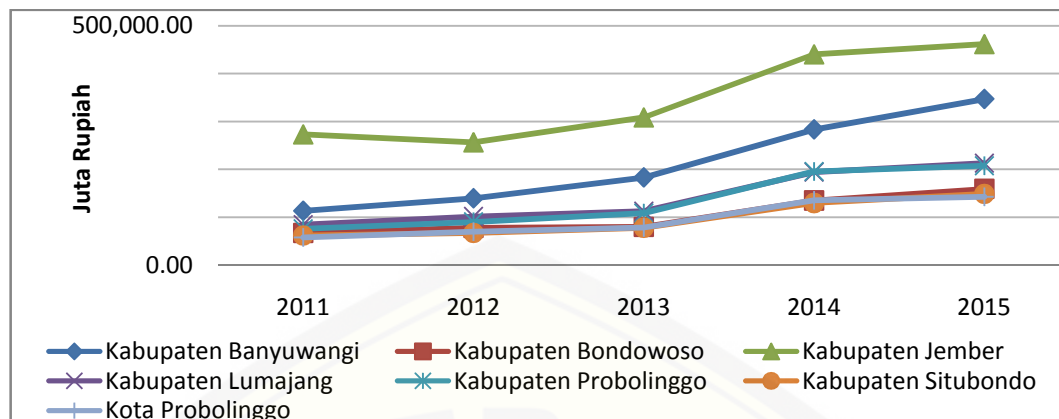
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Bakorwil di Jawa Timur Tahun 2011 – 2015
(Persen)

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Bakorwil I	5,92	6,17	5,72	5,52	5,23	5,71
Bakorwil II	6,86	6,16	5,77	5,40	6,97	6,23
Bakorwil III	6,54	6,76	6,48	6,16	5,60	6,31
Bakorwil IV	4,54	5,14	6,82	4,78	1,50	4,56
Bakorwil V	5,99	6,22	6,00	5,56	5,20	5,79

Sumber : BPS, 2017. *Data diolah*

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2011 sampai 2015 pada setiap Bakorwil di Jawa Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB pada setiap Bakorwil di Jawa Timur berada pada kisaran 4,5 persen sampai 6,31 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi diduduki oleh Bakorwil III dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,31persen, disusul Bakorwil II dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,23 persen, Bakorwil V dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,79 persen, Bakorwil I dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,71 persen dan terendah diduduki oleh Bakorwil IV dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 4,56 persen. Dalam aspek perekonomian yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, Bakorwil V Jawa Timur menduduki peringkat ketiga dari keseluruhan bakorwil di Jawa Timur. Meskipun menduduki posisi ketiga dari keseluruhan bakorwil di Jawa Timur, namun menurut Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa terdapat kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur termasuk dalam daerah tertinggal di Indonesia.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya kontribusi PAD dalam total penerimaan daerah, karena PAD selalu dipandang sebagai indikator atau kriteria mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Karena pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah (Rizkiano, 2011). Untuk melihat kondisi penerimaan PAD pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

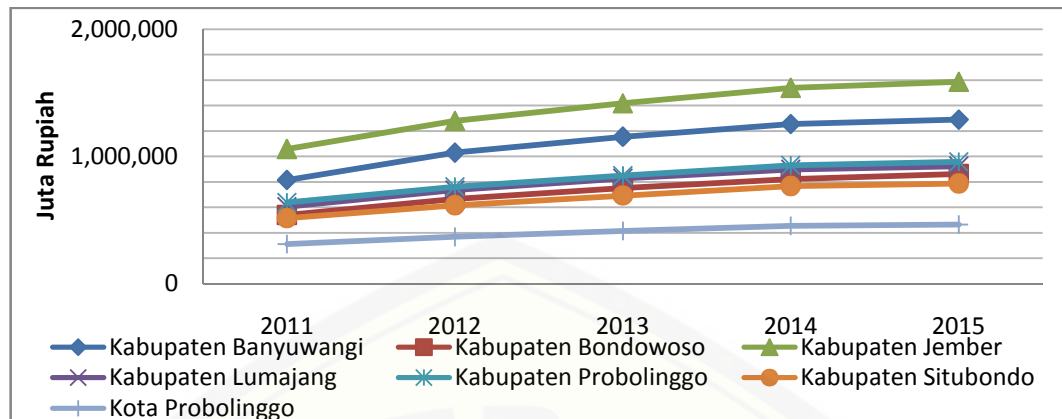


Gambar 1.2 Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2010-2015

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, 2017. *Data diolah*

Gambar 1.2 menjelaskan penerimaan PAD tahun 2011 sampai 2015 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi diduduki oleh Kabupaten Jember sebesar Rp. 462.457.671.749,-, sedangkan penerimaan PAD terendah diduduki oleh Kota Probolinggo sebesar Rp. 142.434.720.375,-.

Untuk menanggulangi kekurangan keuangan daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan pemberlakuan undang-undang ini, kesenjangan dan kekuangan pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah terbantu dengan adanya suntikan dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan *horizontal* (antar daerah) dan kesenjangan *vertikal* (pusat-daerah) (Simanjuntak dalam Sidik 2003, Halim dan Abdullah 2004). Penerimaan dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, DAU memiliki peranan penting dalam menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Kondisi penerimaan DAU pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:

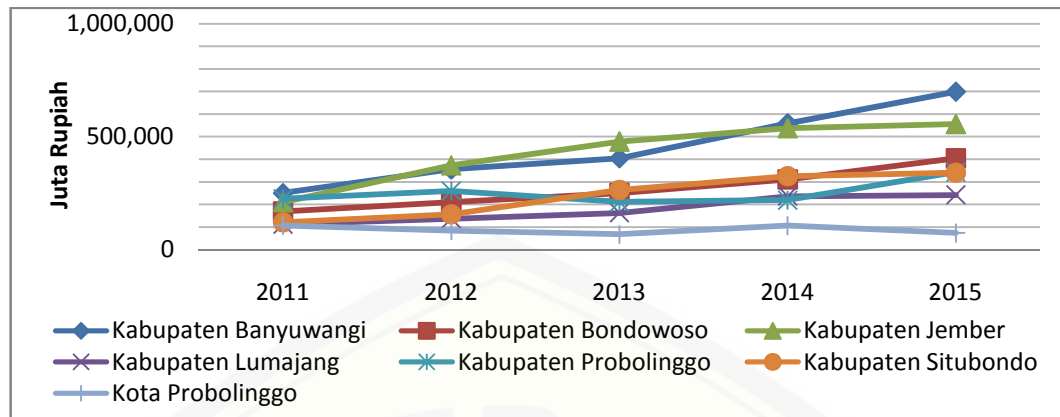


Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan DAU Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2011-2015

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, 2017. *Data diolah*

Penerimaan DAU pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur pada tahun 2011 sampai 2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tahun 2011 sampai 2015, penerimaan DAU tertinggi diduduki oleh Kabupaten Jember dan terendah diduduki oleh Kota Probolinggo. Pada tahun 2015, penerimaan DAU Kabupaten Jember sebesar Rp. 1.586.836.602.000,- dan Kota Probolinggo sebesar Rp. 463.649.666.000,-.

Guna meningkatkan PDRB, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya akan mendorong produktifitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tercipta dari adanya pengeluaran pemerintah daerah yang terwujud dalam belanja modal. Belanja modal yang merupakan bagian investasi pemerintah akan mendorong meningkatkan perkonomian (PDRB) melalui penyediaan prasarana, barang, serta jasa publik. Belanja modal sendiri diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Kondisi belanja modal pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.4 Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Pada Bakorwil V Jawa Timur Tahun 2011-2015

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, 2017. *Data diolah*

Gambar 1.4 menjelaskan Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan terjadi penurunan belanja modal terjadi pada tahun 2010. Penurunan belanja modal pada tahun 2010 disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda, sehingga alokasi belanja modal juga ikut menurun. Pada tahun 2015, belanja modal tertinggi terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 699.415.745.317,- dan terendah pada Kota Probolinggo sebesar Rp. 74.291.701.182,-.

Dalam berbagai penelitian, terdapat hasil berbeda tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dina Apriana dan Rudi Suryanto (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hendarmin (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan Basri Bado (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya permasalahan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik yang dilihat dari kinerja keuangan daerah yang nantinya akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PDRB. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap realita kondisi keuangan kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur. Berdasarkan uraian diatas maka

peneliti mengambil judul “Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Bakorwil V Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur tahun 2003-2015?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur tahun 2003-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan sumber referensi terhadap teori yang diperoleh peneliti dengan fenomena ekonomi yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah, sebagai bahan acuan maupun pertimbangan dalam merencanakan program pembangunan guna merumuskan, menentukan, dan memprioritaskan serta memutuskan arah kebijakan pembangunan.
3. Bagi akademisi, sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai wacana penelitian selanjutnya di berbagai kalangan maupun civitas akademi Universitas Jember.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori penelitian, beberapa penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dasar dalam penulisan penelitian.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomous* yang memiliki arti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dalam *Encyclopedia of Social Science*, otonomi adalah: *the legal self sufficiency of the social body and its actual independence* (Sjafrizal, 2015:106). Dari penjelasan diatas, maka pengertian otonomi menyangkut 2 hal, meliputi kewenangan daerah dalam membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan mengatur pemerintahan sendiri (*self govermence*). Dari penjelasan tersebut maka otonomi daerah pada hakikatnya merupakan kepengurusan rumah tangga sendiri berdasarkan hak dan kewajiban daerah bagi suatu daerah otonom (Surandajang dalam Sjafrizal, 2015:106). Sejalan dengan penjelasan tersebut, Undang-Undang No 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka prinsip otonomi daerah berupa desentralisasi dengan pelimpahan wewenang yang luas, nyata serta bertanggung jawab kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat 3 alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah (Hidayat Syarief dalam Sjafrizal, 2015:106)

1. *Political Equality*, yaitu guna peningkatan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan negara.

2. *Local Accountability*, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah melalui peningkatan kemampuan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.
3. *Local Responsiveness*, yaitu peningkatan kepekaan pemerintah daerah dalam menanggapi permasalahan sosial ekonomi yang berada didaerahnya guna pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah.

Terdapat ciri utama pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi, diantaranya (Halim, 2001 dalam Dwirandra, 2007):

1. Dalam aspek kemampuan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, mengalokasikan, serta mengelola keuangan secara mandiri guna penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dalam aspek ketergantungan, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama dan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibandingkan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah daerah dalam otonomi menjadi lebih besar.

Sukses tidaknya daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tercermin dalam sejauh mana kinerja keuangan daerah tersebut mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil, dimana salah satu cara dengan pengoptimalan PAD secara maksimal sebagai anggaran pembiayaan daerah (Efendi 2011 dalam Prawoto, 2014). Keberhasilan otonomi daerah akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah dimana indikator keberhasilan tersebut terlihat dari (Wenny 2012):

1. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam kenaikan PDRB rill yang mendorong kenaikan pendapatan perkapita masyarakat.
2. Kecenderungan kenaikan investasi asing dan domestik.
3. Kecenderungan berkembangnya prospek bisnis atau usaha di daerah.
4. Kecenderungan peningkatan kreatifitas pemerintah daerah dan masyarakat.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme transfer dana yang bersumber dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) serta memberikan stimulus kepada aktivitas perekonomian masyarakat, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan daerah otonom (Sun'an dan Senuk, 2015:63). Menurut Rondinelli desentralisasi fiskal juga didefinisikan sebagai transfer wewenang serta tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang berada dibawahnya dalam fungsi publik (Suwandi, 2015).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rondinelli (2011) terdapat 4 pembagian kelompok dalam desentralisasi fiskal, yaitu (Suwandi, 2015):

1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat di daerah.
2. Pendelegasian, yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tak langsung oleh pemerintah pusat yang biasanya diatur dalam suatu perundang-undangan.
3. Devolusi, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat.
4. Privatisasi, yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non pemerintah atau swasta.

Makna desentralisasi fiskal dalam bidang keuangan daerah bagi pemerintah daerah berupa pemberdayaan daerah serta pengintensifan daerah dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, terdapat pergeseran tanggung jawab dalam hal pengelolaan pendapatan dan atau

pembelanjaan ke tingkat pemerintah yang lebih rendah (Handayani, 2009). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam desentralisasi fiskal berupa isu kapasitas keuangan daerah dimana kemandirian daerah dalam pelaksanaan pemerintahan di era otonomi daerah yang diukur dari kemampuan menggali penerimaan daerah serta pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005). Selain dalam bentuk kekayaan daerah, keuangan daerah juga berupa sumber keuangan daerah, dimana melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah.

Pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam keuangan daerah berupa:

1. Pendapatan Daerah, bersumber dari
 - a. Pendapatan Asli Daerah, merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari hasil ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari:
 - a) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
 - b) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang ketentuannya diatur dalam undang-undang.
- b. Dana Perimbangan merupakan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna mendukung pendanaan dalam otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari:
- a) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna mendukung pendanaan dalam otonomi daerah.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah Dana Alokasi penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah otonom yang bertujuan guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Dalam penyaluran dana alokasi umum (DAU) digunakan suatu formula yang berdasarkan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan penerimaan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan tertentu guna mendanai kegiatan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain Pendapatan
2. Pembiayaan Daerah, bersumber dari:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan alat manajemen guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam pemerintah daerah (Whittaker, 1995 dalam Wenny 2012). Dalam pengukuran kinerja, akan terdapat umpan balik karena terdapat suatu penilaian sehingga terdapat upaya perbaikan secara terus menerus dalam suatu periode. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja tidak hanya berperan sebagai mekanisme yang memberikan penghargaan serta hukuman, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan manajemen guna memperbaiki kinerja suatu organisasi (Adisasmita, 2011:33)

Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan kombinasi pengukuran guna melihat suatu kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004). Kinerja keuangan daerah juga dapat dimaknai sebagai pencapaian kerja pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan serta pengeluaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Syamsi (1986) kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali serta mengelola sumber keuangan asli daerah guna pemenuhan kebutuhan sebagai pendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan perundang-undangan (Himran, 2014).

Terdapat 3 bidang analisis yang terikat satu sama lain dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (Simanjuntak dalam Halim 2001):

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah menggali sumber penerimaan daerah dan mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan guna meningkatkan penerimaan dalam rangka otonomi daerah.

2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis tentang biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam otonomi daerah guna peningkatan pelayanan publik dan melihat faktor apa saja yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran, yaitu analisis tentang penganggaran antara pendapatan dan pengeluaran yang tercermin dalam APBD serta bagaimana kecenderungan proyeksi guna masa yang akan datang.

Dalam mengukur kinerja keuangan daerah, digunakan suatu analisis rasio keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil analisis rasio keuangan tersebut digunakan dalam (Suprpto, 2006: 56):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah guna mendukung keberhasilan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat perkembangan dan pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sebagai perkembangan aktifitas perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat mengalami peningkatan serta mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi di daerah, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau bahkan lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan ekonomi.

A. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Salah satu konsep pertumbuhan ekonomi yaitu teori Harrod-Domar (terutama dalam sistem regional). Harrod-Domar menekankan teorinya pada empat asumsi, diantaranya: (Tarigan, 2003:49)

1. perekonomian yang bersifat tertutup
2. *Marjinal Prosperity Saving* (MPS) adalah konstan
3. proses produksi memiliki koefisien yang tetap
4. tingkat pertumbuhan angkatan kerja konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Harrod-Domar menyimpulkan dalam pertumbuhan jangka panjang tercapai apabila tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan modal, dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja mencapai keseimbangan. Agar tercapai keseimbangan ini maka antara tabungan dan investasi harus terdapat kaitan yang menyeimbangkan. Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Namun, kesimpulannya menunjukkan bahwa perlunya campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam merencanakan investasi agar tercapai keseimbangan dalam sisi permintaan dan penawaran.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional guna mengganti barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus ada investasi baru sebagai tambahan stok modal (Hasyim, 2016: 241).

B. Teori Pertumbuhan Baru

Teori pertumbuhan baru menganalisis pertumbuhan ekonomi yang bersifat endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem ekonomi. Teori pertumbuhan baru menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem atau faktor-faktor produksi dari dalam dan bukan berasal dari luar sistem. Peranann akumulasi modal juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan baru juga mengasumsikan investasi swasta dan investasi publik dalam bidang sumber daya atau modal manusia akan menciptakan ekonomi eksternal dan memacu peningkatan produktivitas (Todaro, 2000:121). Dengan demikian, dibutuhkan peranan pemerintah dalam pembangunan modal manusia guna meningkatkan produktivitas. Persamaan sederhana yang terdapat dalam teori pertumbuhan baru yaitu:

$$Y = AK$$

Dimana Y merupakan output, K merupakan ketersediaan modal dan A merupakan konstanta. Persamaan diatas menekankan adanya kemungkinan investasi dalam modal fisik maupun modal manusia dapat menciptakan perekonomian yang positif dan meningkatkan produktivitas (Todaro, 2000:122). Dalam teori pertumbuhan endogen menjelaskan peran investasi baik dalam modal fisik maupun modal manusia juga menentukan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang. Dimana tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan (Mankiw, 2007:231).

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ditunjukkan melalui:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah dan $(X - M)$ adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

Dibutuhkan peran mutlak dari pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian. Dalam perekonomian diklasifikasikan peranan pemerintah dalam (Dumairy, 1999:65):

- a. Peran alokasi, dimana pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki agar bias dimanfaatkan secara optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas menuntut adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Peranan alokasi ini tidak hanya melibatkan

pemerintah sebagai pelindung masyarakat, tetapi juga dalam pengeluaran biaya.

- b. Peran distribusi, dimana pemerintah mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil perekonomian secara adil dan wajar. Ketidakmerataan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap wilayah dapat berakibat pada ketidakstabilan nasional sehingga peranan pemerintah sangat dibutuhkan.
- c. Peran stabilitatif, dimana pemerintah memelihara kestabilan perekonomian dan memulihkannya ketika berada pada keadaan disequilibrium. Stabilisasi menjadi isu yang penting dalam mendasari peranan pemerintah dalam perekonomian karena ketidakmampuan pihak swasta dalam mengatasi sejumlah masalah yang ada sehingga berdampak pada perekonomian
- d. Peran dinamisatif, dimana pemerintah menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh berkembang dan maju yang diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan perekonomian tertentu. Hal ini dapat dicontohkan sebagai pemindahan pusat kegiatan ke lokasi yang baru guna meningkatkan anggaran pada sektor yang ingin dikembangkan.

A. Model Pembangunan Tentang Pengeluaran Pemerintah

Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan perekonomian melalui beberapa tahap yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap awal, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana.
2. Tahap menengah, investasi pemerintah masih diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas, namun pada tahap ini peranan investasi pihak swasta sudah semakin besar.

3. Pada tingkat perekonomian lanjut, aktivitas pemerintah beralih pada penyediaan sarana dan prasarana pada pengeluaran-pengeluaran guna aktivitas sosial.

B. Teori Wagner

Teori ini menekankan perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner apabila suatu perekonomian terdapat peningkatan pendapatan perkapita, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Teori Wagner bertumpu pada teori yang disebut *organic theory of state*, yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas melakukan tindakan. Menurut Wagner terdapat hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu:

- a. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.
- b. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
- c. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
- d. Perkembangan demografi.
- e. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto (2010) dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007 dalam Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No 3 Desember 2010. Penelitian ini menggunakan variabel evaluasi kinerja keuangan, tingkat independen, tingkat ketergantungan, desentralisasi fiskal, efektifitas dan efisiensi. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis kinerja keuangan daerah, rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada tahun anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator

kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo” dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 1, No 1 Juni 2010. Penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan yaitu alat analisis deskriptif dan analisis trend. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya otonomi daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, dan belanja daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.

Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) dengan judul “Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali) dalam Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 11 No. 1, halaman: 68-79, Januari 2010. Penelitian ini menggunakan variabel belanja modal, pendapatan asli daerah, kecukupan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu alat analisis deskriptif dan analisis *path*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah, sementara pendapatan daerah sendiri memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa belanja modal, pendapatan daerah, dan kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Havid Sularso dan Yanuar E.R (2011) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa” dalam Jurnal Media Riset Akuntansi Vol 1 No 2 Agustus 2011. Penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan, alokasi

belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Priyo Hari A (2012) dengan judul “Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)” dalam Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. 21 No 1 2012. Penelitian ini menggunakan variabel keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan yaitu indeks kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD. Sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (share) PAD terhadap belanja. Penelitian ini juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Windha Amiga Permanasari (2013) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)” dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Penelitian ini menggunakan variabel DAU, DAK, PAD, belanja modal, pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi .

Asmaul Husna dan Myrna Sofi (2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau” dalam Jurnal Jemi Vol.4 No.2 Desember 2013. Penelitian ini menggunakan variabel PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan.

Elsjamina M. Latuny (2016) dengan judul “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)” dalam Jurnal Vol. X, No.1, Mei 2016. Penelitian ini menggunakan variabel otonomi daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, ketergantungan fiskal. Alat analisis yang digunakan yaitu derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, indeks kemampuan rutin, ketergantungan fiskal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah otonomi daerah belum berhasil memberikan kontribusi yang baik/positif terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nilai derajat desentralisasi fiskal, indeks kemampuan rutin sangat rendah dan tingkat ketergantungan yang sangat besar/tinggi.

Ni Made Nopiani dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” dalam e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol 4 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan variabel PAD, DAU, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis *path*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (5) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan (6) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Meilia Kukitasari dkk (2016) dengan judul “Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan” dalam Jurnal Berkala Efisiensi Vol 16 No.2 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan variabel DAU,

DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis *path*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), DAK tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), PAD tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan secara simultan DAU, DAK, PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kemiskinan.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

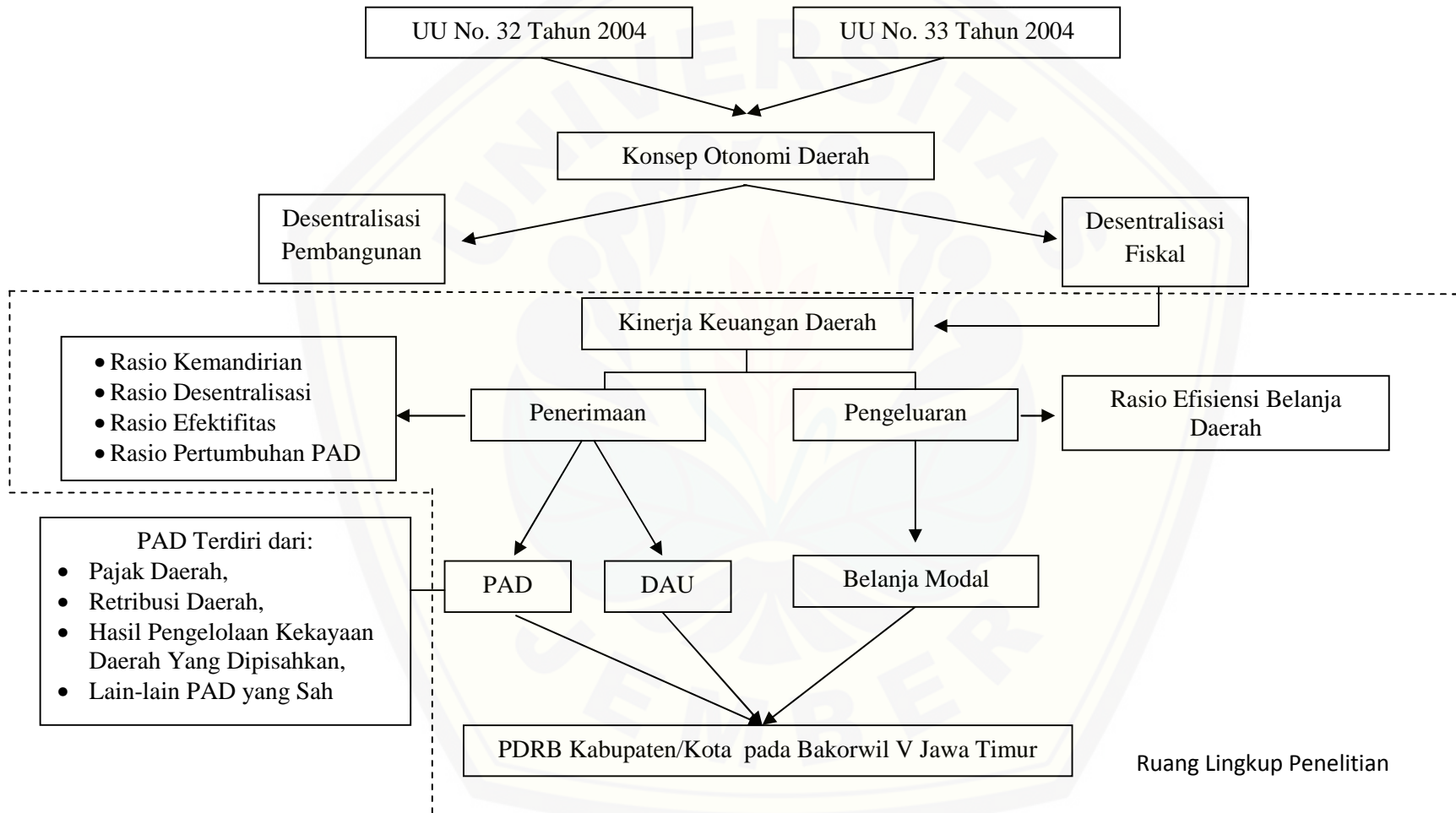
No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007 / Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No 3 Desember 2010	Evaluasi Kinerja Keuangan , Tingkat Independen, Tingkat Ketergantungan Desentralisasi Fiskal, Efektifitas Dan Efisiensi	Analisis Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Tingkat, Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi	Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada tahun anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah sangat kurang. Desentralisasi fiskal cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak efisien.
2.	Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih	Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo / Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 1, No 1 Juni 2010	Kinerja Keuangan, Partumbuhan Ekonomi, Otonomi Daerah	Analisis Deskriptif, Analisis Trend	Sesudah diberlakukannya otonomi daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya belanja daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.
3.	Dina Apriana dan Rudy Suryanto	Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali) / Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 11 No. 1, halaman: 68-79, Januari 2010	Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kecukupan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.	Deskriptif, Analisis Path	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa belanja modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah, sementara pendapatan daerah sendiri memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa belanja modal, pendapatan daerah sendiri, dan kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.	Havid Sularso dan Yanuar E.R	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa / Jurnal Media Riset Akuntansi Vol 1 No 2 Agustus 2011	Kinerja Keuangan, Alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	SEM, AMOS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.
5.	Priyo Hari A	Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali) / Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. 21 No 1 2012	Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kemampuan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD. Sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (share) PAD terhadap belanja. Penelitian ini juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
6.	Windha Amiga Permanasari	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011) / Skripsi	DAU, DAK, PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7.	Asmaul Husna dan Myrna Sofi	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau / Jurnal Jemi Vol.4 No 2 Desember 2013	PAD, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengembangan Wilayah	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan.

8.	Elsjamina M. Latuny	Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat) / Vol. X, No.1, Mei 2016	Otonomi daerah, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, ketergantungan fiskal	Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Indeks Kemampuan Rutin, Ketergantungan Fiskal.	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah otonomi daerah belum berhasil memberikan kontribusi yang baik/positif terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nilai derajat desentralisasi fiskal, Indeks Kemampuan Rutin sangat rendah dan tingkat ketergantungan yang sangat besar/tinggi.
9.	Ni Made Nopiani dkk	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi / e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol 4 Tahun 2016	PAD, DAU, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi	Analisis Path	Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (4) belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (5) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan (6) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.
10.	Meilita Lukitasari dkk	Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan / Jurnal Berkala Efisiensi Vol 16 No 2 Tahun 2016	DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	Analisis Path	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), DAK tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), PAD tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), dan secara simultan DAU, DAK, PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kemiskinan.
11.	Bramantio Putra D	Analisis Kinerja Keuangan Dalam Otonomi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB Pada Bakorwil V Jawa Timur	Kinerja Keuangan, PAD, DAU, Belanja Modal, dan PDRB	Analisis Deskriptif Analisis Regresi Panel	

Sumber: Berbagai sumber

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Penarikan hipotesis ini untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang harus diuji menggunakan data yang dikumpulkan. Berdasarkan rumusan masalah kedua dan teori yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur.
2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur.
3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, dan definisi operasional variabel yang digunakan.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap suatu permasalahan berupa fakta dari suatu populasi yang berkaitan dengan opini dari individu atau kelompok dengan cara menjelaskannya secara jelas. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan prosedur statistik guna mengukur variabel yang berupa angka dan melalui suatu analisis.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu lokasi atau tempat wilayah dimana akan dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bakorwil V Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Pemilihan lokasi pada Bakorwil V Jawa Timur karena masih rendahnya penerimaan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur, dimana berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan penerimaan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur menempati posisi ketiga dibandingkan dengan bakorwil lainnya. Dalam aspek perekonomian yang dilihat dari PDRB, dalam kurun waktu 2011 sampai 2015 berdasarkan Tabel 1.1, rata-rata pertumbuhan PDRB Bakorwil V Jawa Timur menempati posisi ketiga dari keseluruhan bakorwil di Jawa Timur. Kendati rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2015 menempati posisi ketiga dari keseluruhan bakorwil di Jawa Timur, namun terdapat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Berdasarkan penelitian Iswanto (2015), terdapat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota

pada Bakorwil V Jawa Timur dimana Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah yang maju namun tertekan, Kota Probolinggo termasuk daerah yang berkembang, sedangkan Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Probolinggo termasuk dalam daerah yang relatif tertinggal. Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa terdapat kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur termasuk dalam daerah tertinggal di Indonesia. Selain itu Bakorwil V Jawa Timur dipilih karena berada di wilayah paling ujung Pulau Jawa dan memiliki kesamaan karakteristik geografis, sosial, budaya, serta struktur ekonomi, dan juga memiliki keterkaitan keterkaitan sisial ekonomi yang kuat.

Waktu penelitian dilakukan dalam kurun waktu tahun 2003- 2015 dimana dalam kurun waktu tersebut otonomi daerah telah dilaksanakan. Meskipun otonomi daerah resmi dilaksanakan sejak tahun 2001, namun pada tahun 2001 dan 2002 merupakan masa transisi otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Andreas Ronald (2010), yang menunjukkan bahwa pada tahun 2001 dan 2002 merupakan masa-masa peralihan otonomi daerah. Selain itu, sejak tahun 2003 juga mulai diberlakukannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam pasal 19 ayat 2 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai (Bisma, 2010). Pada jangka waktu tersebut peneliti ingin melihat sejauh mana kinerja keuangan daerah dan pengaruh PAD, DAU dan belanja modal terhadap PDRB di kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur. Kurun waktu tersebut dipilih karena keterbatasan data yang diperoleh peneliti sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan rentan waktu tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbaharuan data.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data data kualitatif maupun data kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber seperti Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik, tinjauan literatur dan sumber lainnya. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data berkala (*time series data*) dan jenis data berdasarkan lokasi (*cross section*).

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data Anggaran APBD kabupaten/kota pada Wilayah Bakorwil V Jawa Timur.
2. Data Realisasi APBD kabupaten/kota pada Wilayah Bakorwil V Jawa Timur.
3. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota.
4. Data PDRB kabupaten/kota pada Wilayah Bakorwil V Jawa Timur

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan, rasio desentralisasi, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio efisiensi belanja daerah, serta untuk rumusan masalah kedua digunakan analisis regresi data panel.

3.4.1 Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan Daerah

Untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada wilayah Bakorwil V Jawa Timur, maka digunakan analisis deskriptif kinerja keuangan daerah yang dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Widodo (2001) rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, yang ditunjukkan dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dana darurat dan dana pinjaman (Himran, 2014). Secara umum rasio kemandirian dirumuskan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber pendapatan pihak eksteren (pendapatan transfer)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Dan begitupun sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi (Wenny, 2012).

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsulatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327/1996 (dalam Pramono, 2014)

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2001:168) menjelaskan tentang pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

1. Instruktif, dimana pola hubungan yang peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Konsulatif, merupakan pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah sudah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Partisipatif, merupakan pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah yang bersangkutan mandiri dan mampu melaksanakan otonomi daerah.

4. Delegatif, yaitu pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

B. Rasio Desentralisasi

Rasio desentralisasi digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan serta tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan (Wenny, 2012). Analisis ini dilakukan agar dapat diketahui seberapa besar kontribusi dari PAD terhadap realisasi total penerimaan daerah. Secara umum, rasio desentralisasi dirumuskan:

$$\text{Rasio desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi

Rasio Desentralisasi (%)	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991
(dalam Bisma, 2010)

C. Rasio Efektifitas Keuangan

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Sahra, 2016). Secara umum, rasio efektifitas dirumuskan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD), maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD semakin efektif. Sedangkan apabila

kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target PAD), maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan PAD kurang efektif. Menurut Halim (2002) apabila rasio efektifitas mencapai 1 (100%), berarti daerah tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif (Kemalasari, 2016:36).

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Pramono, 2014)

D. Rasio Pertumbuhan PAD

Untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah untuk mempertahankan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dan bagaimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh setiap tahunnya (Kuncoro, 1995:30). Secara umum, rasio pertumbuhan ini dirumuskan:

$$r = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

r : Laju Pertumbuhan

PAD_t : Jumlah PAD pada tahun t

PAD_{t-1} : Jumlah PAD pada tahun sebelumnya

Apabila semakin tinggi nilai PAD, total pendapatan daerah dan belanja pembangunan yang diikuti rendahnya belanja rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Dalam artian pemerintah daerah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya ke periode berikutnya. Begitupun sebaliknya (Kemalasari, 2016).

E. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/belanja daerah dengan anggaran belanja daerah (Ronald, 2010). Rasio ini juga digunakan guna mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Angka yang dihasilkan rasio efisiensi belanja daerah tidak bersifat absolute melainkan relatif, artinya tidak terdapat standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi belanja daerah ketika memperoleh nilai rasio kurang dari 100 persen, sebaliknya jika memperoleh nilai rasio lebih dari 100 persen mengidentifikasi telah terjadi inefisiensi anggaran (Christian, 2016). Secara umum, rasio efisiensi belanja dirumuskan:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel untuk menjawab rumusan masalah kedua. Analisis regresi data panel merupakan analisis statistik yang menggabungkan antara data runtun waktu (*time series*) dan juga data wilang waktu (*cross section*) (Ghozali, 2014; 291).

Terdapat keuntungan yang diperoleh apabila sebuah penelitian menggunakan data panel, yaitu (Gujarati, 2012: 237):

1. Karena menggabungkan data beberapa individu yang sama (*cross section*) dari beberapa periode waktu (*time series*) maka akan meningkatkan ukuran sampel dalam penelitian.
2. Dengan menggabungkan observasi *time series dan cross section*, data panel memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolineaitas antar variabel, serta memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*).
3. Cocok guna mempelajari dinamika perubahan yang terjadi dan mudah dalam mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
4. Dapat meminimumkan bias yang terjadi ketika mengagregasi individu ke dalam agregasi besar.

Dalam penelitian ini model regresi data panel digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur yang dinotasikan sebagai:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Selanjutnya notasi tersebut ditransformasi ke dalam bentuk ekonometrika menjadi:

$$PDRB = + {}_1PAD_{i,t} + {}_2DAU_{i,t} + {}_3BM_{i,t} + {}_{i,t}$$

Dimana:

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

= Intersep

${}_{i,t}$ = Koefisien variabel

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BM = Belanja Modal

= *Error term*

i = 1,2,3 ..., n (banyaknya sampel/observasi)

t = 1,2,3 ..., T (banyaknya waktu)

Dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa pendekatan metode teknik analisis, yaitu:

A. *Polled Least Square (PLS)*

Dalam model ini, estimator akan menghasilkan *intersept* dan *slope* yang sama untuk setiap individu (${}_1 = {}_2 = {}_3 = \dots = {}_i$ dan ${}_k1 = {}_k2 = {}_k3 = \dots = {}_ki$), dimana k merupakan jenis variabel dan i merupakan observasi ke- i . Dalam persamaan ini mengasumsikan tidak adanya heterogenitas dan mengasumsikan adanya dampak sama yang berlaku untuk semua individu (Ekananda,2015:370).

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$PDRB_{i,t} = + {}_1PAD_{i,t} + {}_2DAU_{i,t} + {}_3BM_{i,t} + {}_{i,t}$$

Dalam persamaan diatas, maka struktur model diasumsikan tidak ada perbedaan karakteristik PDRB di setiap kabupaten/kota selama waktu observasi.

B. *Fixed Effect Model (FEM)*

Dalam model ini, memperhatikan keberagaman dari variabel independen menurut individu dengan mengasumsikan bahwa *intersept* yang berbeda untuk masing-masing individu namun intersepnya tidak berubah seiring waktu atau *time invariant* (Gujarati, 2012: 242). Dampak dari setiap variabel dependen dipertahankan sama untuk setiap individu sepanjang waktu observasi ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$ dan $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_i$). Persamaan yang digunakan adalah:

$$PDRB_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 PAD_{i,t} + \beta_2 DAU_{i,t} + \beta_3 BM_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Dalam persamaan diatas, maka struktur model diasumsikan adanya perbedaan karakteristik PDRB di setiap kabupaten/kota selama waktu observasi.

C. *Random Effect Model (REM)*

Dalam model ini, diasumsikan mempertimbangkan setiap persamaan karakteristik individu. Penentuan α_i dan β_i didasarkan pada asumsi bahwa *intersept* terdistribusi random antar unit μ_i . Dengan kata lain *slope* memiliki nilai yang tetap tetapi *intersept* bervariasi untuk setiap individu. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$PDRB_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 PAD_{i,t} + \beta_2 DAU_{i,t} + \beta_3 BM_{i,t} + \mu_i + \epsilon_{i,t}$$

Dalam persamaan diatas *slope* memiliki nilai tetap tetapi *intersept* α_i memiliki nilai yang bervariasi karena pengaruh random μ_i terhadap *intersept* α_i ($\alpha_{ic} = \alpha_i + \mu_i$) yang bernilai tetap. Model ini mengasumsikan pengaruh dari setiap individu sama.

3.4.3 Uji Spesifikasi Model

A. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian guna memilih apakah model terbaik dalam data panel menggunakan *Pooled Least Square (PLS)* atau *Fixed Effect*

Model (FEM). Pemilihan model dalam Uji Chow dilakukan dengan perhitungan $F_{\text{statistik}}$ dengan rumus (Nachrowi, 2006):

$$F = \frac{SSE_1 - SSE_2 / (n-1)}{SSE_2 / (nt-n-k)}$$

Dimana:

SSE_1 = Sum *Square* dari *Polled Least Square*

SSE_2 = Sum *Square* dari *Random Effect Model*

n = jumlah observasi (*cross section*)

nt = jumlah *cross section* x jumlah *time series*

k = jumlah variabel dependen

Untuk menguji pemilihan model, maka dilakukan dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : menggunakan *Pooled Least Square* atau PLS

H_A : menggunakan *Fixed Effect Model* atau FEM

Dalam memperpertimbangkan dasar penolakan H_0 maka digunakan dengan pertimbangan uji F:

1. Jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}}$ > nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima dan H_A ditolak, menunjukkan model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* (PLS).
2. Jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}}$ < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

B. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian guna memilih apakah model yang terbaik dalam data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Untuk menguji pemilihan model, maka dilakukan dengan pengujian hipotesis sebagai berikut (Ekananda, 2015:405):

H_0 : menggunakan *Random Effect Model* atau REM

H_A : menggunakan *Fixed Effect Model* atau FEM

Dalam memperpertimbangkan dasar penolakan H_0 maka digunakan dengan pertimbangan uji statistic *Chi-Square* :

1. Jika $Chi_{statistik} < Chi_{tabel}$ atau nilai probabilitas $Chi_{statistik}$ nilai probabilitas kritis ($= 5\%$), maka H_0 diterima dan H_A ditolak, menunjukkan model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika $Chi_{statistik} > Chi_{tabel}$ atau nilai probabilitas $Chi_{statistik} <$ nilai probabilitas kritis ($= 5\%$), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

C. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan pengujian guna memilih apakah model terbaik dalam data panel menggunakan *Pooled Least Square* (PLS) atau *Random Effect Model* (REM). Untuk menguji pemilihan model, maka dilakukan dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : menggunakan atau *Pooled Least Square* atau PLS

H_A : menggunakan atau *Random Effect Model* atau REM

Dalam memperpertimbangkan dasar penolakan H_0 maka digunakan dengan pertimbangan uji statistic *Chi-Square* :

1. Jika $LM_{statistik} < Chi_{statistik}$ atau nilai probabilitas $LM_{statistik}$ nilai probabilitas kritis ($= 5\%$), maka H_0 diterima dan H_A ditolak, menunjukkan metode yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. Jika $LM_{statistik} > Chi_{statistik}$ atau nilai probabilitas $LM_{statistik} <$ nilai probabilitas kritis ($= 5\%$), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan metode yang digunakan adalah *Polled Least Square* (PLS).

3.4.4 Uji Statistik

A. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi merupakan salah satu nilai statistik yang digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan pengaruh antara variabel (Algafari, 2011:45). Untuk mengetahui pengaruh besaran presentase semua variabel

independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi ini antara nol sampai satu (0–1) dimana terdapat penjelasan sebagai berikut (Ghozali, 2014:21):

1. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Dengan demikian, maka semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.
2. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu), maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan demikian, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.

B. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F merupakan suatu uji guna melihat apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan (Ghozali, 2014: 22). Rumus uji F sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(k - 1)}{(1 - R^2)/(N - k - 1)}$$

Dimana :

F = Pengujian secara bersama-sama (simultan)

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

N = jumlah observasi

Rumusan hipotesis yang digunakan adalah

1. H_0 : 1, 2, 3 = 0, secara bersama-sama variabel independen (PAD, DAU dan belanja modal) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

2. H_0 : 1, 2, 3 = 0, secara bersama-sama variabel independen (PAD, DAU dan belanja modal) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

Kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu (Algafari, 2011: 72):

1. Jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}}$ > nilai probabilitas (5%), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas (5%), maka H_a diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

C. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lain konstan secara parsial (Ghozali, 2014: 23). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Apakah variabel $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ berpengaruh terhadap variabel Y. Rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana :

- t = pengujian secara parsial
 β_i = koefisien parameter regresi
 $Se(\beta_i)$ = standart deviasi (error)

Rumusan hipotesis yang digunakan adalah

1. H_0 : 1, 2, 3 = 0, secara parsial variabel independen (PAD, DAU dan belanja modal) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

2. H_0 : 1, 2, 3 = 0, secara parsial variabel independen (PAD, DAU dan belanja modal) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

Kriteria pengujian dalam penelitian ini berdasarkan perbandingan nilai $t_{\text{statistik}}$ masing-masing koefisien terhadap nilai t_{tabel} sesuai dengan tingkat keyakinan (α) 5% yang digunakan yaitu:

1. Jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas (5%), maka H_0 diterima dan H_A ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas (5%), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.5 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005: 110). Pengujian uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Jarque-Berra test*, dimana kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $J-B_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka error term tidak terdistribusi secara normal.
2. Jika nilai probabilitas $J-B_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$), maka error term terdistribusi secara normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Artinya, antara variabel independen memiliki hubungan yang mendekati sempurna atau bahkan sempurna, dimana koefisien korelasi tinggi atau mendekati satu (Algafari, 2011:84). Dalam penelitian ini guna melihat terjadinya multikolinearitas dengan menggunakan

matrik korelasi. Jika nilai koefisien lebih dari 0,8 (80%) maka diduga terjadi multikolinearitas dalam model yang digunakan.

Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya gejala multikolinearitas, maka digunakan dengan menggunakan *regresi auxiliary*. *Regresi auxiliary* digunakan dengan menghitung R^2 dari setiap regresi X_i pada variabel regresor (R^2_i). Identifikasi multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai pada R^2 pada model semua dengan model *auxiliary*. Jika R^2 model *auxiliary* lebih besar dari model semua (R^2 model semua lebih rendah dibandingkan dengan R^2 pada *auxiliary regressions*) maka kita mendeteksi adanya multikolinearitas (Ekananda, 2015: 99)

C. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana varians variabel dalam model tidak sama atau konstan (Algafari, 2011: 85). Dalam suatu penelitian, model regresi yang baik dimana tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen.

Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan pengujian korelasi uji Gesjer. Uji Gesjer dilakukan dengan membuat model regresi dengan melibatkan absolute residual sebagai variabel dependen terhadap variabel independen (Algafari, 2011). Rumusan hipotesis yang digunakan dengan membandingkan nilai *p-value* dengan tingkat signifikansi yang digunakan.

1. H_0 : Varian dari nilai sisa tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lain sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. H_A : Varian dari nilai sisa sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lain sehingga dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas.

Kriteria pengujian dalam penelitian ini berdasarkan perbandingan nilai *p-value* dengan tingkat keyakinan () 5% yang digunakan yaitu:

1. Jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas (5%), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan bahwa varian dari nilai sisa sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lain sehingga dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} <$ nilai probabilitas (5%), maka H_A diterima dan H_0 ditolak, menunjukkan bahwa varian dari nilai sisa sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lain sehingga dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas

D. Uji Autokorelasi

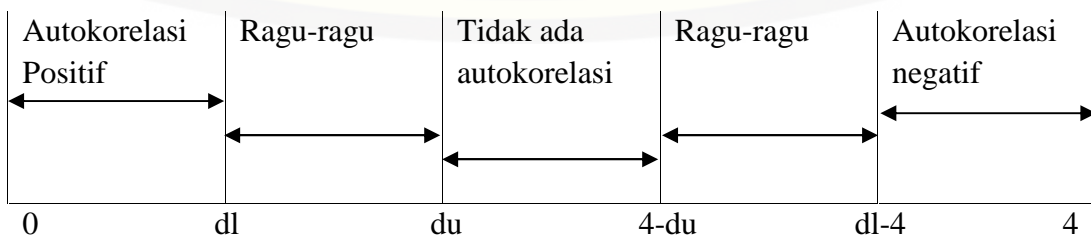
Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat adanya korelasi antar anggota sampel dalam sebuah model regresi. Dengan adanya autokorelasi maka varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasi serta tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel tertentu (Algafari, 2011:88). Untuk melihat adanya autokorelasi maka digunakan mengujian terhadap nilai Durbin-Watson (Uji D_{wj}) yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n (e_t)^2}$$

Tabel 3.4 Kriteria Pengujian Durbin Watson

Kriteria	Hasil
$0 < d < d_l$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi positif
$d_l < d < d_u$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_l < d < 4$	Gagal menolak H_0 ; tidak ada autokorelasi positif/negative
$4 - d_u < d < 4 - d_l$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$du < d < 4 - du$	Menolak H_0 ; ada autokorelasi positif

Sumber: Widarjono (2013,141)



Gambar 3.1 Statistik Durbin-Watson

Sumber: Widarjono, 2013: 141

3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Target penerimaan PAD merupakan rencana anggaran yang ditetapkan dengan melihat data penerimaan PAD tahun sebelumnya (dalam satuan rupiah/tahun).
2. Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut dengan berdasarkan perundang-undangan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (dalam satuan rupiah/tahun).
3. Pendapatan transfer adalah sejumlah penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat (dana perimbangan), transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi (dalam satuan rupiah/tahun).
4. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (dalam satuan rupiah/tahun).
5. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan juga penerimaan lainnya yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan sumber penerimaan lainnya (dalam satuan rupiah/tahun).
6. Belanja daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembiayaan kemasyarakatan di daerah tersebut (dalam satuan rupiah/tahun).
7. Belanja modal adalah realisasi pengeluaran pemerintah dalam APBD berdasarkan jenis pengeluaran langsung (dalam satuan rupiah/tahun).
8. PDRB adalah peningkatan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dari satu tahun ke tahun lainnya. Data yang digunakan adalah data PDRB atas harga konstan 2000 (dalam satuan rupiah/tahun).

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari hasil penelitian, sedangkan saran berisi tentang hal apa saja yang sebaiknya dilakukan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur selama kurun waktu 2003 – 2015 masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari rasio kemandirian tergolong rendah sekali dengan nilai rasio berkisar 7 sampai 13 persen sehingga pola hubungan yang tercipta yaitu instruktif. Rasio desentralisasi tergolong sangat kurang karena memiliki nilai rasio berkisar 7 sampai 11 persen, namun Kota Probolinggo dan Kabupaten Jember memiliki nilai rasio tertinggi yang berada diatas 10 persen dan tergolong dalam kategori kurang. Rasio efektifitas tergolong dalam kategori sangat efektif dimana seluruh kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur memiliki nilai rasio diatas 100 persen dengan kisaran 102 sampai 116 persen. Rasio pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun memiliki trend peningkatan dengan kisaran pertumbuhan PAD sebesar 20 sampai 26 persen. Rasio efisiensi belanja daerah sudah tergolong efisien karena memiliki nilai rasio dibawah 100 persen dengan rata-rata berkisar pada 89 sampai 93 persen.
2. Dari estimasi regresi data panel secara simultan dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) variabel PAD DAU dan belanja modal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur. Secara parsial PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur, sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur.

5.2 Saran

1. Dengan melihat masih rendahnya kinerja keuangan kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur yang dilihat dari masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan transfer dan total pendapatan daerah maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur dapat menggali dan mengelola sumber-sumber PAD serta memperluas sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat dapat semakin berkurang (intensifikasi PAD).
2. Pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur terutama Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo diharapkan diberi kewenangan lebih melalui ekstensifikasi PAD dengan menggali sumber penerimaan baru dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kondisi serta potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan PAD, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena PAD kabupaten tersebut sangat rendah dibandingkan kabupaten lainnya.
3. Pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur khususnya Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi yang memperoleh pendapatan transfer paling tinggi diharapkan melakukan pengawasan yang lebih terhadap pendapatan transfer yang diterima, sehingga kebocoran atau penyelewengan dapat diminimalkan sehingga dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan segala bidang di daerah.
4. Pemerintah kabupaten/kota pada Bakorwil V Jawa Timur diharapkan lebih meningkatkan dan memprioritaskan alokasi belanja modal terhadap sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan daerah, mengingat pengaruh negatif dan tidak signifikan belanja modal terhadap PDRB pada Bakorwil V Jawa Timur dan masih rendahnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah.

5. Bagi peneliti mendatang hendaknya menambahkan jumlah daerah, tahun dan variabel mengingat hasil penelitian yang berbeda disetiap penelitian dan masih terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi PDRB.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hadi. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. 21 (1): 1-19.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Algafari, 2011. *Analisis Regresi Teori. Kasus dan Solusi edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Ani, Ni Luh NP dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi. Pengangguran. Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6 (3):481-497.
- Amiga, Windha Permanasari. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau). Dana Alokasi Khusus (Dak). Pendapatan Asli Daerah (Pad). Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi KASIS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Apriana, Dina dan Rudy Suryanto. 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian Daerah. dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 11 (1):69-79.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka*. Banyuwangi: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka*. Bondowoso: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Jember: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Lumajang Dalam Angka*. Lumajang: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Probolinggo Dalam Angka*. Probolinggo: BPS.

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Situbondo Dalam Angka*. Banyuwangi: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Probolinggo Dalam Angka*. Kota Probolinggo: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2005-2006*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2006-2007*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2007-2008*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2008-2009*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2009-2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012 *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2010-2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2013 *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2011-2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2014 *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2012-2013*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016 *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Jakarta: BPS.
- Bado, Basri. 2015. Analisis Belanja Modal, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. *Econosains* 18 (2): 34-42.
- Bisma, I Dewa Gede dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Jurnal Ekonomi Edisi Khusus*. 4 (3): 75-86
- Christian, Indra Lontaan. 2016. Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal Emba*. 4 (1): 898-906.

- Dirjen Perimbangan Keuangan. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwirandra, A.A.M.B. 2007. Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Ekonomi*. ____ : 1-21.
- Dumairy, 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta. Erlangga.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fiona, Liza. dkk. 2016. Analisis Kapasitas Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi*. 21 (02): 232-247.
- Ghozali, Imam. 2014. *Ekonometrika: Teori. Konsep. dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gubernur Jawa Timur. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016. *Pembentukan Dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur*.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi lima Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim. Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* . No.2/Tahun XIII/25.
- Hasyim. Ali Ibrahim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Pramedia Grup.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*. 8 (3): 144-155.
- Herdaleny, Adelia. 2015. Analisis Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.

- Himran, Yofandi dkk. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2007 - 2013 Di Kabupaten Banggai. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Manado: Universitas Sam Ratulangi.*
- Husna, Asmaul dan Myrna Sofia. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi . 4 (2): 1-12.*
- Iswanto, Denny. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Signifikan. 4 (1): 41-66.*
- Kawa, Erlangga Pati. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Peetumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.*
- Kemalasari, Poppy. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Probolinggo (Tahun Anggaran 2002-2014). *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.*
- Khakim, Lukman dkk. 2011. Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12 (2): 281-296.*
- Kuncoro, M. 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Dilema Otonomi dan Ketergantungan. *Jurnal Prisma. No. 4. 3-17.*
- Kuswoyo, dkk. Tanpa Tahun. Perkembangan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya. 12 (3): 2065-2069.*
- Lucky, Dihan. 2011. Analisis Pengaruh Variabel Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Wilayah Karesidenan Malang Tahun 2004-2009). *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Malang: Universitas Brawijaya.*
- Lukitasari, Meilita dkk. 2016. Pengaruh DAU. DAK. PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi. 16 (2): 218-232.*

- Made, Ni Nopiani dkk. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum. dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha* . Vol. 4.
- Mankiw, 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Matulesy, Febby Sonya. 2013. Analisa Pengaruhkinerja Keuangan (Rasio Efektivitas Dan Rasio Kemandirian) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi*. 7 (1): 1-17.
- Nachrowi, D. 2006. *Ekonometrika: Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
- Parmawati, Eka. 2010. Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 131 Tahun 2015. *Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. 4 November 2015. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.
- Prakarsa, Resa Ardani dkk. 2012. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak. Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. *Jurnal Akmenbis*. 1 (1): 1-14
- Prastiwi, Dewi, dkk. 2014. Analisis Perbandingan Kemandirian Daerah Pasca Pendaerahan Bphtb Di Kab/Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. 2 (3): 319-335.
- Prawoto, Bayu. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2001-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.
- Purba, Edwin Ricardo. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Desentralisasi Fiskal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Medan : Universitas Sumatra Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Taun 2016. *Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. 23 Desember 2016. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No. 67. Surabaya.

- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Among Karti* 7 (13): 83-112.
- Prawoto, Bayu. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2001-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS STIE Indonesia*. 8 (2): 105-113.
- Rizkiano, Aswin. 2011. Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2004-2008 di Kota Salatiga. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ronald, Andreas dan Dwi Sarmiyatiningsih. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 1 (1): 31-42.
- Ramadhan, Rozki E. 2015. Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Jember Tahun 2005-2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.
- Sahra, Naela Alfi. 2016. Analisis Rasio Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.
- Samuelson, P. A dan Nordhaus. W. D. 2001. *Makro Ekonomi: Edisi Keempat Belas Alih Bahasa Haris Munandar dkk*. Jakarta: Erlangga
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari, Greynaldi Normala dkk. Tanpa tahun. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sholikhah, Ratna. 2011. Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, R. (2001). “Kebijakan Pungutan daerah di Era Otonomi”. Makalah Seminar sehari “Domestic Trade. Decentralization. and Globalization”.

diselenggarakan oleh USAID dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan di hotel Borobudur Jakarta 3 April 2001. Sugiyono 2012.

Siswanto, Guntur. 2014. Pengembangan Ekonomi Wilayah Kota Metro Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Provinsi Lampung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sjafrizal, 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suci, Stannia Cahaya. 2013. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sularso, Havid dan Yanuar E Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. 1 (2): 109-124.

Sun'an, Muammil dan Abdurrahman Senuk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suwandi, 2015. *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penyerapan Tenaga Kerja. Kemiskinan. Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Budi Utama.

Syamsudin dkk. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengangguran Dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*. 17(1): 15-27.

Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga..

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. 15 Oktober 2004. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126. Jakarta.

Wahyuni, Nanik. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang*.

Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah* . 2 (1): 39-51.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Website:

www.bps.go.id

www.jatimbps.go.id

www.dpjk.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

Lampiran A
Komponen PAD

Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	10.944.983.261	15.984.909.529	1.099.059.955	13.937.997.146	41.966.949.891
2004	13.182.514.989	16.999.091.559	2.330.414.572	3.767.125.522	36.279.146.641
2005	14.232.129.027	18.183.575.330	3.843.696.937	6.085.445.991	42.344.847.284
2006	16.470.085.863	13.252.943.054	5.399.308.907	18.603.599.750	53.725.937.574
2007	17.929.227.800	13.658.774.175	6.945.031.796	22.570.233.460	61.103.267.231
2008	20.484.607.838	20.331.387.587	8.967.999.762	24.186.837.360	73.970.832.547
2009	21.484.858.333	30.774.665.887	7.987.568.192	26.730.473.532	86.977.565.945
2010	26.131.270.486	20.810.313.879	8.786.914.196	34.928.406.965	90.656.905.526
2011	32.449.080.866	21.621.743.609	9.983.335.503	49.310.393.490	113.364.553.468
2012	40.288.363.990	24.818.889.408	14.503.063.660	59.904.266.941	139.514.583.999
2013	65.939.965.334	28.650.551.431	14.141.339.290	74.504.021.367	183.235.877.422
2014	94.133.355.280	67.276.765.522	15.562.622.841	106.515.959.538	283.488.703.181
2015	115.906.214.213	31.299.048.537	15.571.579.256	184.215.489.200	346.992.331.206

Kabupaten Bondowoso

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	2.939.136.928	5.420.005.034	117.171.110	12.695.736.137	21.172.049.209
2004	3.434.303.746	5.832.560.350	688.344.701	8.630.716.987	18.585.925.784
2005	3.902.859.379	8.244.166.805	719.789.895	7.912.110.464	20.778.926.543
2006	4.218.321.333	12.858.975.209	1.086.870.196	5.406.183.801	23.570.350.539
2007	4.614.174.980	15.969.316.440	2.212.322.178	7.383.054.024	30.178.867.622
2008	5.230.451.800	19.272.445.957	2.217.988.696	8.650.991.431	35.371.877.885
2009	5.258.596.820	24.621.752.403	2.786.207.415	7.455.304.654	40.121.861.293
2010	6.156.076.823	34.468.356.419	3.109.360.268	5.930.147.510	49.663.941.019
2011	9.092.480.799	15.553.447.295	4.564.588.194	37.605.875.987	66.816.392.275
2012	10.079.064.406	19.908.881.115	4.962.292.188	42.895.939.948	77.846.177.657
2013	11.206.732.325	19.862.949.933	3.465.620.367	45.024.420.259	79.559.722.884
2014	21.279.683.953	12.644.635.114	3.541.409.767	97.218.891.566	134.684.620.400
2015	22.428.418.000	17.521.087.192	3.650.499.000	115.374.204.820	158.974.209.012

Kabupaten Jember

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	11.288.805.291	20.938.640.118	1.691.000.000	3.673.825.970	11.288.805.291
2004	10.874.598.824	20.174.393.915	2.763.725.979	9.342.226.036	10.874.598.824
2005	16.311.036.159	22.675.332.290	3.778.804.620	8.707.547.008	16.311.036.159
2006	19.178.932.830	24.234.505.964	6.452.165.263	17.482.657.531	19.178.932.830
2007	21.533.246.972	30.630.781.249	8.579.869.750	17.256.367.461	21.533.246.972
2008	24.222.730.281	65.539.640.137	15.005.991.734	31.710.436.907	24.222.730.281
2009	26.471.856.842	78.007.402.211	15.747.510.243	14.795.517.082	26.471.856.842
2010	30.917.767.094	19.602.718.100	11.938.481.438	88.476.771.160	30.917.767.094
2011	40.708.973.394	20.816.368.771	15.290.566.018	195.981.431.947	40.708.973.394
2012	55.628.583.942	40.417.112.857	15.225.383.199	145.104.123.952	55.628.583.942
2013	95.188.144.409	44.192.346.021	11.411.667.411	157.584.423.945	95.188.144.409
2014	116.578.557.515	62.592.167.396	8.591.234.367	252.700.053.211	116.578.557.515
2015	123.210.707.077	34.452.393.109	5.282.747.387	298.936.515.573	123.210.707.077

Kabupaten Lumajang

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	6.537.409.889	14.448.470.197	555.000.000	4.234.152.725	25.775.032.811
2004	7.827.709.413	16.196.378.335	237.500.000	3.194.409.726	27.455.997.474
2005	8.680.600.664	20.419.835.479	303.021.041	4.949.924.378	34.353.381.563
2006	8.923.680.853	25.284.916.716	487.082.129	11.303.400.346	45.999.080.044
2007	8.924.529.135	29.883.079.769	703.596.605	14.174.588.410	53.685.793.919
2008	9.700.909.629	33.422.060.139	2.155.812.637	9.695.753.507	54.974.535.912
2009	13.481.736.899	39.990.829.035	2.648.581.373	9.220.214.529	65.341.361.835
2010	16.731.655.724	18.155.994.884	3.238.738.188	39.413.861.313	77.540.250.109
2011	15.537.518.940	19.705.159.253	4.194.390.136	44.840.004.271	84.277.072.600
2012	18.632.360.574	22.536.337.878	3.726.243.863	56.278.859.618	101.173.801.933
2013	21.601.343.403	21.937.809.267	2.843.081.228	66.024.590.235	112.406.824.133
2014	31.623.242.555	37.721.873.040	2.924.550.480	121.806.438.080	194.076.104.155
2015	39.218.958.000	24.282.297.000	2.923.561.000	146.160.277.000	212.585.093.000

Kabupaten Probolinggo

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	5.988.849.646	5.633.690.820	37.000.000	12.045.863.258	23.705.403.724
2004	6.461.196.849	6.678.161.093	197.439.238	6.224.978.781	19.561.775.961
2005	6.332.116.015	6.731.965.053	223.176.864	9.277.997.101	22.565.255.032
2006	7.122.141.000	13.645.475.000	680.819.000	10.731.130.000	32.179.565.000
2007	7.290.814.791	15.928.942.873	738.947.597	14.101.932.661	38.060.637.922
2008	8.324.117.940	19.525.821.204	2.223.559.160	9.615.000.844	39.688.499.148
2009	9.494.801.630	20.670.476.245	3.421.413.060	8.961.311.331	42.548.002.266
2010	11.375.722.891	22.074.109.694	4.776.287.156	7.798.546.108	46.024.665.849
2011	14.500.649.959	37.363.470.510	8.180.781.027	15.609.958.415	75.654.859.912
2012	17.352.155.277	24.216.968.967	8.280.095.481	40.160.237.584	90.009.457.309
2013	20.438.494.720	25.976.527.795	5.087.363.982	57.010.813.992	108.513.200.489
2014	32.996.575.751	36.371.140.953	5.218.666.346	120.677.244.194	195.263.627.244
2015	40.127.956.899	20.620.171.850	5.380.843.664	141.241.371.747	207.370.344.160

Kabupaten Situbondo

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	4.157.995.249	5.386.221.040	718.549.538	5.351.249.697	15.614.015.524
2004	4.802.738.850	6.199.098.572	664.353.234	1.424.859.178	13.091.049.835
2005	5.797.920.740	6.194.656.245	884.754.417	11.268.223.897	24.145.555.298
2006	5.919.273.000	1.326.716.000	935.869.000	9.407.823.000	17.589.681.000
2007	6.385.338.900	6.873.729.824	1.358.217.230	14.864.411.127	29.481.697.080
2008	7.286.173.468	11.469.267.571	2.624.312.433	9.974.957.471	31.354.710.943
2009	8.036.364.768	12.673.280.620	2.723.971.178	10.479.411.315	33.913.027.881
2010	9.246.964.308	8.221.138.727	3.562.491.664	25.549.351.575	46.579.946.274
2011	11.111.182.280	9.211.617.798	5.018.136.616	36.420.353.807	61.761.290.502
2012	14.128.755.469	11.787.252.518	4.236.714.535	36.897.757.994	67.050.480.515
2013	17.188.209.720	16.014.432.520	4.292.216.221	40.548.549.471	78.043.407.932
2014	24.287.378.394	25.283.322.856	4.092.920.658	86.076.956.024	139.740.577.932
2015	26.451.180.607	21.245.936.586	4.233.412.108	96.577.429.679	148.507.958.980

Kota Probolinggo

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2003	4.049.490.267	9.886.130.394	234.492.301	2.141.933.050	16.312.046.012
2004	4.224.581.481	12.437.819.507	278.202.268	1.585.707.984	18.526.311.241
2005	4.752.724.857	14.716.293.658	366.736.282	1.305.608.863	21.141.363.660
2006	5.392.873.370	18.590.704.260	595.521.947	4.126.266.463	28.705.366.040
2007	5.456.891.548	21.163.819.195	674.312.518	8.133.894.978	35.428.918.239
2008	6.319.226.594	24.643.462.468	1.050.836.818	6.017.119.877	38.030.645.757
2009	6.848.148.685	26.696.154.761	1.179.090.565	5.361.829.833	40.085.223.844
2010	7.701.059.684	29.649.626.604	1.312.600.315	7.052.189.270	45.715.475.873
2011	11.713.781.859	10.584.811.872	1.653.391.416	33.504.989.789	57.456.974.936
2012	13.933.502.844	11.006.288.148	1.027.155.168	43.294.542.550	69.261.488.710
2013	20.951.122.357	11.870.773.952	739.526.619	44.842.762.128	78.404.185.056
2014	24.457.670.693	15.330.543.060	762.599.815	94.512.032.319	135.062.845.887
2015	26.691.349.430	12.702.076.865	783.805.224	102.257.488.856	142.434.720.375

Lampiran B
Rasio Kemandirian Keuangan

Kabupaten Banyuwangi

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	41.966.949.891	415.089.884.581	10,11
2004	36.279.146.641	429.437.012.227	8,44
2005	42.344.847.284	464.887.608.139	9,10
2006	53.725.937.573	752.198.352.345	7,14
2007	61.103.267.230	811.191.558.955	7,53
2008	73.970.832.546	940.565.487.465	7,86
2009	86.977.565.944	1.036.440.536.941	8,39
2010	90.656.905.526	1.106.440.901.011	8,19
2011	113.364.553.468	1.301.626.643.683	8,70
2012	139.514.583.999	1.491.483.677.134	9,35
2013	183.235.877.421	1.702.794.926.492	10,76
2014	283.488.703.181	1.989.017.340.887	14,25
2015	346.992.331.206	2.264.852.415.693	15,32
Rata-rata			9,62

Kabupaten Bondowoso

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	21.172.049.209	257.499.725.725	8,22
2004	18.585.925.784	277.406.936.587	6,70
2005	20.778.926.543	285.113.775.364	7,29
2006	23.570.350.539	413.520.860.730	5,70
2007	30.178.867.621	489.385.623.135	6,17
2008	35.371.877.885	547.792.408.239	6,46
2009	40.121.861.293	612.709.765.253	6,55
2010	49.663.941.019	707.305.242.365	7,02
2011	66.816.392.275	847.394.999.169	7,88
2012	77.846.177.656	935.146.859.674	8,32
2013	79.559.722.884	1.114.110.761.017	7,14
2014	134.684.620.400	1.238.611.083.374	10,87
2015	158.974.209.179	1.051.590.156.581	15,12
Rata-rata			7,95

Kabupaten Jember

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	37.592.271.378	514.350.391.276	7,31
2004	43.154.944.754	538.109.662.527	8,02
2005	51.472.720.077	569.332.241.785	9,04
2006	67.348.261.587	874.661.235.907	7,70
2007	78.000.265.431	1.032.494.259.289	7,55
2008	136.478.799.059	1.126.675.364.817	12,11
2009	135.022.286.377	1.182.764.870.569	11,42
2010	150.935.737.792	1.339.431.134.881	11,27
2011	272.797.340.130	1.661.118.151.245	16,42
2012	256.375.203.950	1.483.625.722.077	17,28
2013	308.376.581.785	1.588.896.753.256	19,41
2014	440.462.012.489	1.746.847.365.217	25,21
2015	461.882.363.146	1.917.759.331.546	24,08
Rata-rata			13,60

Kabupaten Lumajang

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	25.775.032.810	318.340.655.504	8,10
2004	27.455.997.473	311.349.883.710	8,82
2005	34.353.381.562	349.132.037.657	9,84
2006	45.999.080.044	518.986.950.188	8,86
2007	53.685.793.918	592.371.651.500	9,06
2008	54.974.535.912	664.967.742.238	8,27
2009	65.341.361.835	697.105.126.482	9,37
2010	77.540.250.109	783.647.110.306	9,89
2011	84.277.072.600	917.425.677.691	9,19
2012	101.173.801.933	1.029.224.976.304	9,83
2013	112.406.824.133	1.173.891.768.269	9,58
2014	194.076.104.155	1.335.277.899.152	14,53
2015	212.585.093.000	1.067.949.312.205	19,91
Rata-rata			10,40

Kabupaten Probolinggo

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	23.705.403.724	317.202.830.781	7,47
2004	19.561.775.961	308.715.661.600	6,34
2005	22.565.255.032	342.693.416.450	6,58
2006	32.188.565.000	510.667.000.000	6,30
2007	38.060.637.922	610.638.347.106	6,23
2008	39.688.499.147	662.400.800.721	5,99
2009	42.548.002.266	700.946.039.963	6,07
2010	46.024.665.848	800.810.154.703	5,75
2011	75.654.859.911	1.058.720.312.325	7,15
2012	90.009.457.309	1.136.469.155.339	7,92
2013	108.513.200.488	1.250.146.862.696	8,68
2014	195.263.627.244	1.389.679.735.705	14,05
2015	207.370.344.160	1.125.950.388.769	18,42
Rata-rata			8,22

Kabupaten Situbondo

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	15.614.015.524	234.802.812.536	6,65
2004	13.091.049.834	249.272.158.533	5,25
2005	24.145.555.298	282.856.130.860	8,54
2006	17.592.681.000	424.074.616.241	4,15
2007	29.481.697.080	476.825.366.031	6,18
2008	31.354.710.942	537.753.233.927	5,83
2009	33.913.027.881	574.317.190.237	5,90
2010	46.579.946.273	608.076.571.861	7,66
2011	61.761.290.501	762.533.004.309	8,10
2012	67.050.480.515	869.976.093.398	7,71
2013	78.043.407.931	1.014.348.555.495	7,69
2014	129.640.577.932	1.156.284.408.115	11,21
2015	148.507.958.980	1.289.706.242.588	11,51
Rata-rata			7,41

Kota Probolinggo

Tahun	PAD (rupiah)	Pendapatan Transfer (rupiah)	Rasio Kemandirian (persen)
2003	16.312.046.011	142.747.540.735	11,43
2004	18.526.311.240	145.894.470.578	12,70
2005	21.141.363.660	165.579.136.362	12,77
2006	28.705.366.040	271.728.621.270	10,56
2007	35.428.918.239	340.130.947.754	10,42
2008	38.030.645.757	366.840.847.594	10,37
2009	40.085.223.843	405.145.588.826	9,89
2010	45.715.475.873	438.940.319.366	10,41
2011	57.456.974.936	491.244.142.130	11,70
2012	69.261.488.710	535.637.945.067	12,93
2013	78.404.185.056	495.494.215.850	15,82
2014	135.062.845.887	683.362.100.310	19,76
2015	142.434.720.375	682.685.226.032	20,86
	Rata-rata		13,04

Lampiran C
Rasio Desentralisasi

Kabupaten Banyuwangi

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	41.966.949.891	488.442.623.291	8,59
2004	36.279.146.641	494.501.226.013	7,34
2005	42.344.847.284	535.885.015.423	7,90
2006	53.725.937.573	805.924.289.919	6,67
2007	61.103.267.230	924.739.798.026	6,61
2008	73.970.832.546	1.020.359.472.497	7,25
2009	86.977.565.944	1.143.692.289.989	7,60
2010	90.656.905.526	1.208.157.900.899	7,50
2011	113.364.553.468	1.450.320.872.078	7,82
2012	139.514.583.999	1.690.113.711.134	8,25
2013	183.235.877.421	1.917.058.035.076	9,56
2014	283.488.703.181	2.418.962.318.839	11,72
2015	346.992.331.206	2.779.148.430.146	12,49
Rata-rata			8,41

Kabupaten Bondowoso

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	21.172.049.209	313.589.480.665	6,75
2004	18.585.925.784	313.044.416.450	5,94
2005	20.778.926.543	316.700.701.907	6,56
2006	23.570.350.539	440.351.378.293	5,35
2007	30.178.867.621	519.564.490.756	5,81
2008	35.371.877.885	586.839.725.157	6,03
2009	40.121.861.293	678.711.928.046	5,91
2010	49.663.941.019	818.542.099.884	6,07
2011	66.816.392.275	966.956.040.944	6,91
2012	77.846.177.656	1.073.390.149.430	7,25
2013	79.559.722.884	1.266.838.948.992	6,28
2014	134.684.620.400	1.534.483.210.060	8,78
2015	158.974.209.179	1.800.277.754.015	8,83
Rata-rata			6,65

Kabupaten Jember

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	37.592.271.378	588.230.310.918	6,39
2004	43.154.944.754	613.656.445.281	7,03
2005	51.472.720.077	658.867.251.862	7,81
2006	67.348.261.587	942.009.497.494	7,15
2007	78.000.265.431	1.110.557.928.328	7,02
2008	136.478.799.059	1.280.782.663.876	10,66
2009	135.022.286.377	1.338.578.671.946	10,09
2010	150.935.737.792	1.539.989.802.673	9,80
2011	272.797.340.130	1.882.586.732.606	14,49
2012	256.375.203.950	2.146.090.218.860	11,95
2013	308.376.581.785	2.366.370.839.531	13,03
2014	440.462.012.489	2.798.612.164.201	15,74
2015	461.882.363.146	3.116.542.849.533	14,82
Rata-rata			10,46

Kabupaten Lumajang

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	25.775.032.810	373.797.076.644	6,90
2004	27.455.997.473	356.614.379.253	7,70
2005	34.353.381.562	389.672.627.659	8,82
2006	45.999.080.044	572.890.086.852	8,03
2007	53.685.793.918	646.182.658.018	8,31
2008	54.974.535.912	719.975.701.114	7,64
2009	65.341.361.835	769.191.626.255	8,49
2010	77.540.250.109	871.820.212.548	8,89
2011	84.277.072.600	1.017.748.039.906	8,28
2012	101.173.801.933	1.145.170.690.298	8,83
2013	112.406.824.133	1.299.318.897.389	8,65
2014	194.076.104.155	1.545.618.399.754	12,56
2015	212.585.093.000	1.707.539.550.203	12,45
Rata-rata			8,89

Kabupaten Probolinggo

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	23.705.403.724	374.988.334.391	6,32
2004	19.561.775.961	345.887.858.145	5,66
2005	22.565.255.032	377.825.671.482	5,97
2006	32.188.565.000	542.855.562.275	5,93
2007	38.060.637.922	658.698.985.028	5,78
2008	39.688.499.147	717.089.299.868	5,53
2009	42.548.002.266	776.389.797.229	5,48
2010	46.024.665.848	903.709.481.861	5,09
2011	75.654.859.911	1.135.279.347.236	6,66
2012	90.009.457.309	1.285.349.253.303	7,00
2013	108.513.200.488	1.381.935.052.365	7,85
2014	195.263.627.244	1.655.881.524.749	11,79
2015	207.370.344.160	1.842.200.787.638	11,26
Rata-rata			6,95

Kabupaten Situbondo

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	15.614.015.524	265.186.194.060	5,89
2004	13.091.049.834	279.047.924.340	4,69
2005	24.145.555.298	309.885.346.158	7,79
2006	17.592.681.000	447.103.576.696	3,93
2007	29.481.697.080	515.057.063.111	5,72
2008	31.354.710.942	579.176.444.869	5,41
2009	33.913.027.881	610.725.953.118	5,55
2010	46.579.946.273	680.876.876.035	6,84
2011	61.761.290.501	855.715.430.310	7,22
2012	67.050.480.515	979.961.442.413	6,84
2013	78.043.407.931	1.109.471.305.726	7,03
2014	129.640.577.932	1.359.193.724.048	9,54
2015	148.507.958.980	1.520.359.975.571	9,77
Rata-rata			6,63

Kota Probolinggo

Tahun	PAD (rupiah)	Total Pendapatan Daerah (rupiah)	Rasio Desentralisasi (persen)
2003	16.312.046.011	174.539.626.064	9,35
2004	18.526.311.240	173.681.781.819	10,67
2005	21.141.363.660	193.973.883.023	10,90
2006	28.705.366.040	303.288.918.311	9,46
2007	35.428.918.239	378.859.865.993	9,35
2008	38.030.645.757	409.257.667.883	9,29
2009	40.085.223.843	471.917.427.669	8,49
2010	45.715.475.873	517.244.300.240	8,84
2011	57.456.974.936	565.212.884.066	10,17
2012	69.261.488.710	614.208.004.952	11,28
2013	78.404.185.056	682.356.282.136	11,49
2014	135.062.845.887	872.815.764.197	15,47
2015	142.434.720.375	859.993.069.407	16,56
Rata-rata			10,87

Lampiran D
Rasio Efektifitas

Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	41.966.949.891	42.160.238.470	99,54
2004	36.279.146.641	38.582.522.006	94,03
2005	42.344.847.284	39.465.189.686	107,30
2006	53.725.937.573	39.815.687.352	134,94
2007	61.103.267.230	48.991.503.286	124,72
2008	73.970.832.546	62.784.566.300	117,82
2009	86.977.565.944	69.009.556.469	126,04
2010	90.656.905.526	87.091.140.847	104,09
2011	113.364.553.468	106.124.047.726	106,82
2012	139.514.583.999	119.657.070.444	116,60
2013	183.235.877.421	171.602.586.394	106,78
2014	283.488.703.181	225.108.843.353	125,93
2015	346.992.331.206	303.208.751.986	114,44
Rata-rata			113,77

Kabupaten Bondowoso

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	21.172.049.209	26.803.411.670	78,99
2004	18.585.925.784	23.761.573.924	78,22
2005	20.778.926.543	23.794.585.201	87,33
2006	23.570.350.539	22.180.939.672	106,26
2007	30.178.867.621	30.374.184.174	99,36
2008	35.371.877.885	29.995.818.008	117,92
2009	40.121.861.293	39.566.376.641	101,40
2010	49.663.941.019	45.781.983.200	108,48
2011	66.816.392.275	60.582.172.950	110,29
2012	77.846.177.656	68.082.147.300	114,34
2013	79.559.722.884	77.480.709.250	102,68
2014	134.684.620.400	127.504.215.467	105,63
2015	158.974.209.179	142.330.589.457	111,69
Rata-rata			101,74

Kabupaten Jember

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	37.592.271.378	36.868.282.820	101,96
2004	43.154.944.754	45.206.525.381	95,46
2005	51.472.720.077	43.905.074.520	117,24
2006	67.348.261.587	53.189.640.812	126,62
2007	78.000.265.431	68.752.732.073	113,45
2008	136.478.799.059	113.611.449.986	120,13
2009	135.022.286.377	119.817.126.079	112,69
2010	150.935.737.792	149.343.456.734	101,07
2011	272.797.340.130	172.299.295.701	158,33
2012	256.375.203.950	237.881.681.826	107,77
2013	308.376.581.785	303.845.078.814	101,49
2014	440.462.012.489	504.157.202.641	87,37
2015	461.882.363.146	508.448.614.149	90,84
Rata-rata			110,34

Kabupaten Lumajang

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	25.775.032.810	27.025.570.000	95,37
2004	27.455.997.473	29.461.341.650	93,19
2005	34.353.381.562	32.986.546.750	104,14
2006	45.999.080.044	38.159.879.100	120,54
2007	53.685.793.918	48.222.500.000	111,33
2008	54.974.535.912	55.304.944.400	99,40
2009	65.341.361.835	59.041.163.236	110,67
2010	77.540.250.109	69.698.986.800	111,25
2011	84.277.072.600	84.886.744.000	99,28
2012	101.173.801.933	87.053.508.000	116,22
2013	112.406.824.133	107.282.152.250	104,78
2014	194.076.104.155	153.882.022.300	126,12
2015	212.585.093.000	170.242.763.900	124,87
Rata-rata			109,01

Kabupaten Probolinggo

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	23.705.403.724	21.188.832.000	111,88
2004	19.561.775.961	21.149.478.000	92,49
2005	22.565.255.032	19.362.170.000	116,54
2006	32.188.565.000	22.224.192.000	144,84
2007	38.060.637.922	29.128.950.000	130,66
2008	39.688.499.147	33.696.291.000	117,78
2009	42.548.002.266	39.930.801.000	106,55
2010	46.024.665.848	41.908.896.000	109,82
2011	75.654.859.911	69.024.951.900	109,61
2012	90.009.457.309	77.286.465.900	116,46
2013	108.513.200.488	91.828.314.812	118,17
2014	195.263.627.244	160.143.841.546	121,93
2015	207.370.344.160	184.119.656.426	112,63
Rata-rata			116,10

Kabupaten Situbondo

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	15.614.015.524	14.066.889.907	111,00
2004	13.091.049.834	12.112.354.892	108,08
2005	24.145.555.298	21.332.825.576	113,18
2006	17.592.681.000	17.908.671.896	98,24
2007	29.481.697.080	22.780.462.136	129,42
2008	31.354.710.942	28.119.625.248	111,50
2009	33.913.027.881	29.206.333.151	116,12
2010	46.579.946.273	43.033.091.813	108,24
2011	61.761.290.501	53.045.739.663	116,43
2012	67.050.480.515	60.590.209.445	110,66
2013	78.043.407.931	73.190.222.487	106,63
2014	129.640.577.932	115.603.036.102	112,14
2015	148.507.958.980	144.330.951.021	102,89
Rata-rata			111,12

Kota Probolinggo

Tahun	Realisasi PAD (rupiah)	Target PAD (rupiah)	Rasio Efektifitas (persen)
2003	16.312.046.011	15.234.889.000	107,07
2004	18.526.311.240	16.765.127.620	110,51
2005	21.141.363.660	20.626.332.175	102,50
2006	28.705.366.040	25.284.296.722	113,53
2007	35.428.918.239	28.114.882.900	126,01
2008	38.030.645.757	32.345.541.867	117,58
2009	40.085.223.843	37.858.227.543	105,88
2010	45.715.475.873	46.939.564.817	97,39
2011	57.456.974.936	61.488.686.225	93,44
2012	69.261.488.710	60.446.049.225	114,58
2013	78.404.185.056	77.731.333.766	100,87
2014	135.062.845.887	101.459.544.753	133,12
2015	142.434.720.375	108.620.970.113	131,13
	Rata-rata		111,82

Lampiran E
Rasio Pertumbuhan PAD

Kabupaten Banyuwangi

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	41.966.949.891	-
2004	36.279.146.641	-13,55
2005	42.344.847.284	16,72
2006	53.725.937.573	26,88
2007	61.103.267.230	13,73
2008	73.970.832.546	21,06
2009	86.977.565.944	17,58
2010	90.656.905.526	4,23
2011	113.364.553.468	25,05
2012	139.514.583.999	23,07
2013	183.235.877.421	31,34
2014	283.488.703.181	54,71
2015	346.992.331.206	22,40
Rata-rata		20,27

Kabupaten Bondowoso

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	21.172.049.209	-
2004	18.585.925.784	-12,21
2005	20.778.926.543	11,80
2006	23.570.350.539	13,43
2007	30.178.867.621	28,04
2008	35.371.877.885	17,21
2009	40.121.861.293	13,43
2010	49.663.941.019	23,78
2011	66.816.392.275	34,54
2012	77.846.177.656	16,51
2013	79.559.722.884	2,20
2014	134.684.620.400	69,29
2015	158.974.209.179	18,03
Rata-rata		19,67

Kabupaten Jember

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	37.592.271.378	-
2004	43.154.944.754	14,80
2005	51.472.720.077	19,27
2006	67.348.261.587	30,84
2007	78.000.265.431	15,82
2008	136.478.799.059	74,97
2009	135.022.286.377	-1,07
2010	150.935.737.792	11,79
2011	272.797.340.130	80,74
2012	256.375.203.950	-6,02
2013	308.376.581.785	20,28
2014	440.462.012.489	42,83
2015	461.882.363.146	4,86
Rata-rata		25,76

Kabupaten Lumajang

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	25.775.032.810	-
2004	27.455.997.473	6,52
2005	34.353.381.562	25,12
2006	45.999.080.044	33,90
2007	53.685.793.918	16,71
2008	54.974.535.912	2,40
2009	65.341.361.835	18,86
2010	77.540.250.109	18,67
2011	84.277.072.600	8,69
2012	101.173.801.933	20,05
2013	112.406.824.133	11,10
2014	194.076.104.155	72,66
2015	212.585.093.000	9,54
Rata-rata		20,35

Kabupaten Probolinggo

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	23.705.403.724	-
2004	19.561.775.961	-17,48
2005	22.565.255.032	15,35
2006	32.188.565.000	42,65
2007	38.060.637.922	18,24
2008	39.688.499.147	4,28
2009	42.548.002.266	7,20
2010	46.024.665.848	8,17
2011	75.654.859.911	64,38
2012	90.009.457.309	18,97
2013	108.513.200.488	20,56
2014	195.263.627.244	79,94
2015	207.370.344.160	6,20
	Rata-rata	22,37

Kabupaten Situbondo

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	15.614.015.524	-
2004	13.091.049.834	-16,16
2005	24.145.555.298	84,44
2006	17.592.681.000	-27,14
2007	29.481.697.080	67,58
2008	31.354.710.942	6,35
2009	33.913.027.881	8,16
2010	46.579.946.273	37,35
2011	61.761.290.501	32,59
2012	67.050.480.515	8,56
2013	78.043.407.931	16,40
2014	129.640.577.932	66,11
2015	148.507.958.980	14,55
	Rata-rata	24,90

Kota Probolinggo

Tahun	PAD (rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (persen)
2003	16.312.046.011	-
2004	18.526.311.240	13,57
2005	21.141.363.660	14,12
2006	28.705.366.040	35,78
2007	35.428.918.239	23,42
2008	38.030.645.757	7,34
2009	40.085.223.843	5,40
2010	45.715.475.873	14,05
2011	57.456.974.936	25,68
2012	69.261.488.710	20,54
2013	78.404.185.056	13,20
2014	135.062.845.887	72,26
2015	142.434.720.375	5,46
	Rata-rata	20,90

Lampiran F
Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	494.785.539.355	506.231.469.462	97,74
2004	481.882.143.682	508.565.162.800	94,75
2005	497.773.832.080	542.307.080.518	91,79
2006	681.285.786.185	801.734.234.245	84,98
2007	932.428.539.625	1.074.597.103.068	86,77
2008	924.106.553.898	1.160.899.775.515	79,60
2009	1.170.748.674.750	1.348.612.292.586	86,81
2010	1.219.931.614.411	1.400.499.728.517	87,11
2011	1.443.011.683.822	1.631.397.418.692	88,45
2012	1.680.895.444.056	1.863.654.982.009	90,19
2013	1.886.309.069.853	2.104.452.542.374	89,63
2014	2.296.136.155.708	2.553.844.868.775	89,91
2015	2.741.772.556.679	3.058.085.990.507	89,66
Rata-rata			89,03

Kabupaten Bondowoso

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	321.468.537.304	364.526.483.822	88,19
2004	312.932.018.248	352.518.337.998	88,77
2005	321.486.975.516	351.108.488.761	91,56
2006	410.793.561.723	457.563.134.680	89,78
2007	498.627.447.120	559.371.619.767	89,14
2008	600.953.474.997	667.086.874.976	90,09
2009	705.698.336.448	732.711.883.813	96,31
2010	765.513.977.032	830.993.200.421	92,12
2011	950.958.157.445	1.035.811.127.474	91,81
2012	1.074.126.371.922	1.122.663.670.246	95,68
2013	1.266.305.195.495	1.348.289.811.090	93,92
2014	1.471.104.168.912	1.591.840.017.761	92,42
2015	1.776.098.167.403	1.939.647.442.904	91,57
Rata-rata			91,64

Kabupaten Jember

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	591.998.917.862	616.426.857.039	96,04
2004	621.733.456.525	632.002.618.141	98,38
2005	595.151.611.865	631.926.904.645	94,18
2006	937.518.878.638	981.016.540.516	95,57
2007	1.046.008.516.184	1.085.955.274.567	96,32
2008	1.206.631.522.381	1.271.755.640.224	94,88
2009	1.336.327.498.922	1.381.103.522.513	96,76
2010	1.503.014.965.569	1.627.982.710.251	92,32
2011	1.784.833.475.920	1.984.041.248.345	89,96
2012	2.087.832.260.013	2.115.511.137.372	98,69
2013	2.348.129.104.082	2.664.173.575.989	88,14
2014	2.694.841.111.194	3.137.645.245.722	85,89
2015	3.086.379.911.906	3.611.633.926.758	85,46
Rata-rata			93,27

Kabupaten Lumajang

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	347.657.368.217	348.648.446.718	99,72
2004	347.183.643.687	357.335.155.177	97,16
2005	368.458.422.593	411.741.505.720	89,49
2006	497.026.008.289	539.529.228.151	92,12
2007	629.852.050.686	696.191.416.994	90,47
2008	727.011.267.375	803.332.013.544	90,50
2009	769.697.459.876	824.541.595.989	93,35
2010	846.558.522.874	928.485.218.896	91,18
2011	995.026.472.137	1.122.087.108.548	88,68
2012	1.100.512.111.173	1.165.501.788.055	94,42
2013	1.237.250.864.103	1.445.310.712.271	85,60
2014	1.472.595.339.059	1.696.087.684.843	86,82
2015	1.660.465.122.739	1.958.470.692.226	84,78
Rata-rata			91,10

Kabupaten Probolinggo

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	348.786.401.014	363.805.621.000	95,87
2004	349.117.677.764	370.977.812.000	94,11
2005	356.537.373.593	383.370.644.000	93,00
2006	508.665.573.137	519.568.640.000	97,90
2007	606.054.643.717	650.834.975.000	93,12
2008	657.838.608.333	709.178.922.000	92,76
2009	721.436.150.511	748.531.787.000	96,38
2010	861.394.887.451	921.524.433.600	93,47
2011	1.112.602.221.083	1.195.174.729.060	93,09
2012	1.290.406.987.331	1.365.795.220.077	94,48
2013	1.329.410.577.152	1.469.760.095.046	90,45
2014	1.524.038.393.412	1.751.268.478.205	87,02
2015	1.879.876.712.132	2.111.667.219.683	89,02
	Rata-rata		93,11

Kabupaten Situbondo

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	313.908.758.227	330.389.598.070	95,01
2004	285.822.004.496	307.695.942.728	92,89
2005	266.599.762.536	295.396.664.648	90,25
2006	387.232.650.432	420.450.050.000	92,10
2007	484.363.187.094	537.166.731.636	90,17
2008	569.539.004.874	638.892.853.599	89,14
2009	628.721.153.925	675.898.495.720	93,02
2010	689.729.076.684	754.956.617.566	91,36
2011	838.589.264.436	905.069.747.982	92,65
2012	927.268.554.211	1.043.487.899.641	88,86
2013	1.150.103.067.653	1.222.569.896.214	94,07
2014	1.305.647.017.406	1.419.118.441.083	92,00
2015	1.477.881.147.079	1.683.652.011.372	87,78
	Rata-rata		91,49

Kota Probolinggo

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi (persen)
2003	167.739.382.975	170.429.200.300	98,42
2004	179.676.246.518	184.694.837.237	97,28
2005	190.272.898.080	195.389.103.476	97,38
2006	276.351.116.981	295.362.106.221	93,56
2007	376.527.868.973	396.640.901.152	94,93
2008	419.155.464.989	443.196.966.363	94,58
2009	455.036.254.430	495.501.876.753	91,83
2010	499.429.844.388	551.266.299.307	90,60
2011	578.775.934.813	622.123.356.836	93,03
2012	611.170.952.842	633.450.334.223	96,48
2013	655.931.244.053	732.492.777.763	89,55
2014	778.254.103.608	907.766.807.435	85,73
2015	731.680.260.277	904.576.722.490	80,89
Rata-rata			92,64

Lampiran G. Data Regresi Panel

Daerah	Tahun	Variabel			
		PDRB	PAD	DAU	Belanja Modal
Kab.Banyuwangi	2003	7.725.700.000.000	41.966.949.891	356.260.000.000	83.861.150.326
Kab.Banyuwangi	2004	8.029.340.000.000	36.279.146.641	372.023.000.000	54.044.797.336
Kab.Banyuwangi	2005	8.481.260.000.000	42.344.847.284	398.823.000.000	46.258.937.595
Kab.Banyuwangi	2006	8.750.000.000.000	53.725.937.574	629.281.000.000	96.525.046.442
Kab.Banyuwangi	2007	9.243.000.000.000	61.103.267.231	698.228.000.000	235.313.957.532
Kab.Banyuwangi	2008	9.779.000.000.000	73.970.832.547	771.131.582.000	161.726.444.798
Kab.Banyuwangi	2009	10.380.000.000.000	86.977.565.945	766.830.353.000	299.667.852.130
Kab.Banyuwangi	2010	11.015.000.000.000	90.656.905.526	761.897.082.000	137.257.934.501
Kab.Banyuwangi	2011	11.840.000.000.000	113.364.553.468	815.156.279.000	250.847.215.238
Kab.Banyuwangi	2012	12.656.000.000.000	139.514.583.999	1.030.217.037.000	355.481.803.517
Kab.Banyuwangi	2013	13.512.000.000.000	183.235.877.422	1.154.495.171.000	404.860.203.010
Kab.Banyuwangi	2014	14.282.000.000.000	283.488.703.181	1.254.496.229.000	558.546.677.148
Kab.Banyuwangi	2015	15.141.000.000.000	346.992.331.206	1.288.940.680.000	699.415.745.317
Kab.Bondowoso	2003	2.188.000.000.000	21.172.049.209	234.020.000.000	41.268.129.832
Kab.Bondowoso	2004	2.297.000.000.000	18.585.925.784	251.718.000.000	28.812.804.550
Kab.Bondowoso	2005	2.417.000.000.000	20.778.926.543	251.718.000.000	28.614.622.000
Kab.Bondowoso	2006	2.552.000.000.000	23.570.350.539	362.750.000.000	43.607.847.457
Kab.Bondowoso	2007	2.693.000.000.000	30.178.867.622	397.430.000.000	89.000.334.561
Kab.Bondowoso	2008	2.837.000.000.000	35.371.877.885	447.561.068.000	88.554.947.514
Kab.Bondowoso	2009	2.979.000.000.000	40.121.861.293	455.450.603.000	112.005.479.411
Kab.Bondowoso	2010	3.147.000.000.000	49.663.941.019	479.819.794.000	113.213.796.550
Kab.Bondowoso	2011	3.342.000.000.000	66.816.392.275	539.918.142.000	169.878.279.817
Kab.Bondowoso	2012	3.556.000.000.000	77.846.177.657	666.857.212.000	210.599.590.951
Kab.Bondowoso	2013	3.761.000.000.000	79.559.722.884	752.776.704.000	251.144.647.576
Kab.Bondowoso	2014	3.951.000.000.000	134.684.620.400	821.583.706.981	311.495.490.129
Kab.Bondowoso	2015	4.146.000.000.000	158.974.209.179	862.599.540.000	404.576.533.409
Kab.Jember	2003	7.882.000.000.000	37.592.271.379	456.800.000.004	108.995.782.740
Kab.Jember	2004	8.249.000.000.000	43.154.944.754	472.427.000.000	105.009.296.147
Kab.Jember	2005	8.686.000.000.000	51.472.720.077	500.842.999.992	78.422.446.838
Kab.Jember	2006	9.182.000.000.000	67.348.261.587	770.394.000.000	167.973.307.771
Kab.Jember	2007	9.731.000.000.000	78.000.265.432	861.126.000.000	230.075.544.709
Kab.Jember	2008	10.319.000.000.000	136.478.799.059	942.532.809.000	274.510.234.216
Kab.Jember	2009	10.892.000.000.000	135.022.286.378	940.397.110.000	226.759.413.838
Kab.Jember	2010	11.551.000.000.000	150.935.737.792	955.007.373.000	149.822.296.804
Kab.Jember	2011	12.360.000.000.000	272.797.340.130	1.058.648.472.000	210.061.688.084
Kab.Jember	2012	13.251.000.000.000	256.375.203.950	1.279.295.764.000	372.743.795.951
Kab.Jember	2013	14.166.000.000.000	308.376.581.786	1.417.603.982.000	478.577.397.312
Kab.Jember	2014	14.844.000.000.000	440.462.012.489	1.539.722.508.000	537.521.256.032
Kab.Jember	2015	15.845.000.000.000	461.882.363.146	1.586.836.602.000	556.408.885.143
Kab.Lumajang	2003	4.353.050.000.000	25.775.032.811	275.107.608.000	78.799.875.005
Kab.Lumajang	2004	4.570.180.000.000	27.455.997.474	265.664.000.000	28.915.243.985
Kab.Lumajang	2005	4.793.730.000.000	34.353.381.563	283.848.000.000	50.227.720.200
Kab.Lumajang	2006	5.126.000.000.000	45.999.080.044	438.186.000.000	133.857.063.503
Kab.Lumajang	2007	5.409.000.000.000	53.685.793.919	479.591.000.000	155.409.922.735
Kab.Lumajang	2008	5.702.000.000.000	54.974.535.912	537.879.076.000	144.194.210.804

Kab.Lumajang	2009	6.014.000.000.000	65.341.361.835	534.208.130.000	85.380.769.905
Kab.Lumajang	2010	6.370.000.000.000	77.540.250.109	557.172.733.000	75.963.695.789
Kab.Lumajang	2011	6.769.000.000.000	84.277.072.600	605.781.974.000	112.572.880.724
Kab.Lumajang	2012	7.204.000.000.000	101.173.801.933	736.273.179.000	136.316.168.000
Kab.Lumajang	2013	7.672.000.000.000	112.406.824.133	828.524.528.000	163.055.838.729
Kab.Lumajang	2014	8.080.000.000.000	194.076.104.155	898.217.627.000	236.756.736.151
Kab.Lumajang	2015	8.454.000.000.000	212.585.093.000	923.492.395.000	242.225.160.000
Kab.Probolinggo	2003	4.683.600.000.000	23.705.403.724	254.500.000.000	138.771.609.407
Kab.Probolinggo	2004	4.894.980.000.000	19.561.775.961	261.881.427.786	47.941.194.900
Kab.Probolinggo	2005	5.126.680.000.000	22.565.255.032	279.153.000.000	52.117.568.994
Kab.Probolinggo	2006	5.366.000.000.000	32.188.565.000	438.188.000.000	127.618.624.000
Kab.Probolinggo	2007	5.685.000.000.000	38.060.637.922	484.750.000.000	151.258.397.553
Kab.Probolinggo	2008	6.015.000.000.000	39.688.499.148	531.084.756.000	148.397.069.713
Kab.Probolinggo	2009	6.359.000.000.000	42.548.002.266	551.285.137.000	164.940.475.505
Kab.Probolinggo	2010	6.752.000.000.000	46.024.665.849	568.850.488.000	100.021.193.247
Kab.Probolinggo	2011	7.172.000.000.000	75.654.859.912	638.828.595.000	225.588.664.789
Kab.Probolinggo	2012	7.642.000.000.000	90.009.457.309	761.569.639.000	260.067.973.455
Kab.Probolinggo	2013	8.145.000.000.000	108.513.200.489	848.994.313.000	211.259.728.570
Kab.Probolinggo	2014	8.544.000.000.000	195.263.627.244	929.380.602.000	219.199.470.248
Kab.Probolinggo	2015	8.950.000.000.000	207.370.344.160	956.969.595.000	343.189.339.904
Kab.Situbondo	2003	2.468.600.000.000	15.614.015.524	203.560.000.000	52.591.216.401
Kab.Situbondo	2004	2.573.130.000.000	13.091.049.835	206.730.000.000	27.519.413.353
Kab.Situbondo	2005	2.703.990.000.000	24.145.555.298	221.834.000.000	19.268.899.130
Kab.Situbondo	2006	2.852.000.000.000	17.592.681.000	346.404.000.000	107.528.829.000
Kab.Situbondo	2007	3.031.000.000.000	29.481.697.080	383.831.000.000	127.958.806.776
Kab.Situbondo	2008	3.167.000.000.000	31.354.710.943	427.846.472.000	134.471.005.343
Kab.Situbondo	2009	3.330.000.000.000	33.913.027.881	433.443.480.000	122.877.793.721
Kab.Situbondo	2010	3.522.050.000.000	46.579.946.274	447.609.618.000	85.925.600.153
Kab.Situbondo	2011	3.744.000.000.000	61.761.290.502	515.752.127.000	120.719.312.264
Kab.Situbondo	2012	3.989.000.000.000	67.050.480.515	616.093.730.000	155.800.530.132
Kab.Situbondo	2013	4.246.000.000.000	78.043.407.932	692.549.026.000	264.570.994.896
Kab.Situbondo	2014	4.492.000.000.000	129.640.577.932	766.542.999.000	325.053.037.623
Kab.Situbondo	2015	4.710.000.000.000	148.507.958.980	787.728.919.000	340.683.173.356
Kota Probolinggo	2003	1.356.240.000.000	16.312.046.012	109.391.737.966	60.467.372.149
Kota Probolinggo	2004	1.432.570.000.000	18.526.311.241	112.709.534.000	23.071.578.048
Kota Probolinggo	2005	1.513.800.000.000	21.141.363.660	117.368.000.000	28.801.710.169
Kota Probolinggo	2006	1.629.000.000.000	28.705.366.040	199.720.000.000	38.877.876.539
Kota Probolinggo	2007	1.733.000.000.000	35.428.918.239	226.917.680.800	118.250.951.023
Kota Probolinggo	2008	1.837.000.000.000	38.030.645.757	250.880.269.000	102.542.843.210
Kota Probolinggo	2009	1.905.000.000.000	40.085.223.844	259.533.136.000	133.313.103.134
Kota Probolinggo	2010	2.022.000.000.000	45.715.475.873	268.392.765.000	105.488.555.563
Kota Probolinggo	2011	2.155.000.000.000	57.456.974.936	311.327.135.000	107.039.867.359
Kota Probolinggo	2012	2.303.000.000.000	69.261.488.710	367.601.263.000	84.706.525.879
Kota Probolinggo	2013	2.460.000.000.000	78.404.185.056	414.534.284.000	68.161.679.883
Kota Probolinggo	2014	2.606.000.000.000	135.062.845.887	454.208.196.000	106.923.357.838
Kota Probolinggo	2015	2.759.000.000.000	142.434.720.375	463.649.666.000	74.291.701.182

Lampiran H

H.1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	265.146448	(6,81)	0.0000
Cross-section Chi-square	275.480121	6	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PDRB
Method: Panel Least Squares
Date: 10/10/17 Time: 06:41
Sample: 2003 2015
Periods included: 13
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.73E+11	5.09E+11	-0.537323	0.5924
PAD	-4.875043	5.404491	-0.902036	0.3695
DAU	13.39880	1.656390	8.089159	0.0000
BM	-6.154507	3.412705	-1.803410	0.0748
R-squared	0.757788	Mean dependent var		6.20E+12
Adjusted R-squared	0.749436	S.D. dependent var		3.79E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Akaike info criterion		59.42442
Sum squared resid	3.13E+26	Schwarz criterion		59.53479
Log likelihood	-2699.811	Hannan-Quinn criter.		59.46895
F-statistic	90.72966	Durbin-Watson stat		0.135699
Prob(F-statistic)	0.000000			

H.2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.846946	3	0.0031

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	8.180121	7.984923	0.006865	0.0185
DAU	3.882244	4.020979	0.001675	0.0007
BM	-0.587252	-0.677279	0.001833	0.0355

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 10/10/17 Time: 06:41

Sample: 2003 2015

Periods included: 13

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.25E+12	1.67E+11	19.53327	0.0000
PAD	8.180121	1.476881	5.538782	0.0000
DAU	3.882244	0.514228	7.549648	0.0000
BM	-0.587252	0.889049	-0.660539	0.5108

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988265	Mean dependent var	6.20E+12
Adjusted R-squared	0.986961	S.D. dependent var	3.79E+12
S.E. of regression	4.33E+11	Akaike info criterion	56.52903
Sum squared resid	1.52E+25	Schwarz criterion	56.80495
Log likelihood	-2562.071	Hannan-Quinn criter.	56.64035
F-statistic	757.9482	Durbin-Watson stat	0.493634
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran I**I.1 Hasil Regresi Data Panel *Pooled Least Square***

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:40
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.73E+11	5.09E+11	-0.537323	0.5924
PAD	-4.875043	5.404491	-0.902036	0.3695
DAU	13.39880	1.656390	8.089159	0.0000
BM	-6.154507	3.412705	-1.803410	0.0748
R-squared	0.757788	Mean dependent var	6.20E+12	
Adjusted R-squared	0.749436	S.D. dependent var	3.79E+12	
S.E. of regression	1.90E+12	Akaike info criterion	59.42442	
Sum squared resid	3.13E+26	Schwarz criterion	59.53479	
Log likelihood	-2699.811	Hannan-Quinn criter.	59.46895	
F-statistic	90.72966	Durbin-Watson stat	0.135699	
Prob(F-statistic)	0.000000			

I.2 Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:40
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.25E+12	1.67E+11	19.53327	0.0000
PAD	8.180121	1.476881	5.538782	0.0000
DAU	3.882244	0.514228	7.549648	0.0000
BM	-0.587252	0.889049	-0.660539	0.5108

Effects Specification**Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.988265	Mean dependent var	6.20E+12
Adjusted R-squared	0.986961	S.D. dependent var	3.79E+12
S.E. of regression	4.33E+11	Akaike info criterion	56.52903
Sum squared resid	1.52E+25	Schwarz criterion	56.80495
Log likelihood	-2562.071	Hannan-Quinn criter.	56.64035
F-statistic	757.9482	Durbin-Watson stat	0.493634
Prob(F-statistic)	0.000000		

I.3 Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/10/17 Time: 06:40
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91
 Swamy and Arora estimator of component variances

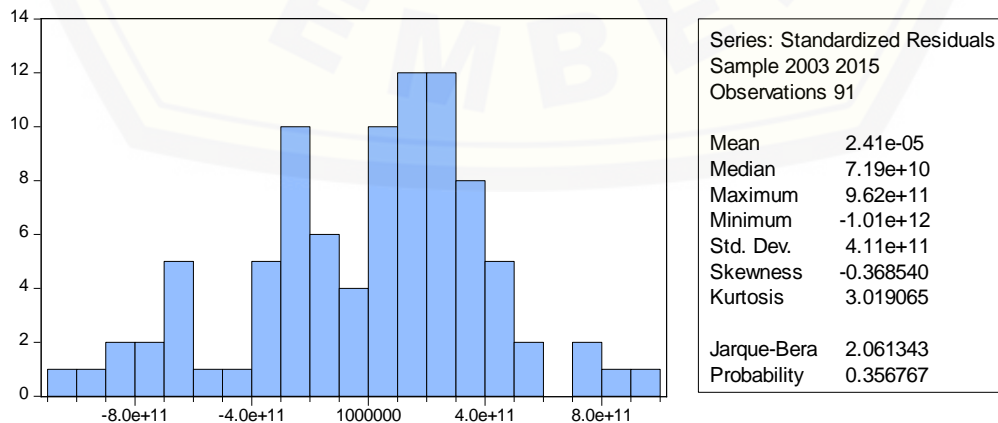
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.20E+12	6.01E+11	5.330862	0.0000
PAD	7.984923	1.474555	5.415142	0.0000
DAU	4.020979	0.512597	7.844327	0.0000
BM	-0.677279	0.888018	-0.762687	0.4477

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.53E+12	0.9257
Idiosyncratic random		4.33E+11	0.0743

Weighted Statistics			
R-squared	0.917797	Mean dependent var	4.85E+11
Adjusted R-squared	0.914963	S.D. dependent var	1.57E+12
S.E. of regression	4.59E+11	Sum squared resid	1.83E+25
F-statistic	323.7856	Durbin-Watson stat	0.410260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.592638	Mean dependent var	6.20E+12
Sum squared resid	5.27E+26	Durbin-Watson stat	0.014276

Lampiran J Hasil Uji Normalitas



Lampiran K Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	BM
PAD	1.000000	0.901602	0.859471
DAU	0.901602	1.000000	0.891264
BM	0.859471	0.891264	1.000000

Lampiran L L.1 Hasil Uji Regresi Auxiliary Variabel Dependen PDRB

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:40
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.25E+12	1.67E+11	19.53327	0.0000
PAD	8.180121	1.476881	5.538782	0.0000
DAU	3.882244	0.514228	7.549648	0.0000
BM	-0.587252	0.889049	-0.660539	0.5108

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988265	Mean dependent var	6.20E+12
Adjusted R-squared	0.986961	S.D. dependent var	3.79E+12
S.E. of regression	4.33E+11	Akaike info criterion	56.52903
Sum squared resid	1.52E+25	Schwarz criterion	56.80495
Log likelihood	-2562.071	Hannan-Quinn criter.	56.64035
F-statistic	757.9482	Durbin-Watson stat	0.493634
Prob(F-statistic)	0.000000		

L.2 Hasil Uji Regresi Auxiliary Variabel Dependen PAD

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:44
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.37E+10	1.03E+10	-6.194757	0.0000
DAU	0.212114	0.030492	6.956368	0.0000
BM	0.162732	0.064002	2.542596	0.0129

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.880202	Mean dependent var	9.02E+10
Adjusted R-squared	0.868514	S.D. dependent var	8.93E+10
S.E. of regression	3.24E+10	Akaike info criterion	51.33274
Sum squared resid	8.59E+22	Schwarz criterion	51.58107
Log likelihood	-2326.640	Hannan-Quinn criter.	51.43293
F-statistic	75.31060	Durbin-Watson stat	0.779649
Prob(F-statistic)	0.000000		

L.3 Hasil Uji Regresi Auxiliary Variabel Dependen DAU

Dependent Variable: DAU
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:45
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.84E+11	1.72E+10	16.46790	0.0000
PAD	1.749637	0.251516	6.956368	0.0000
BM	0.893654	0.163441	5.467730	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.926951	Mean dependent var	5.94E+11
Adjusted R-squared	0.919825	S.D. dependent var	3.28E+11
S.E. of regression	9.30E+10	Akaike info criterion	53.44278
Sum squared resid	7.09E+23	Schwarz criterion	53.69111
Log likelihood	-2422.647	Hannan-Quinn criter.	53.54297
F-statistic	130.0672	Durbin-Watson stat	0.706900
Prob(F-statistic)	0.000000		

L.4 Hasil Uji Regresi Auxilliary Variabel Dependen Belanja Modal

Dependent Variable: BM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:45
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.73E+10	2.00E+10	-2.364736	0.0204
PAD	0.449068	0.176618	2.542596	0.0129
DAU	0.298972	0.054679	5.467730	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.855124	Mean dependent var	1.71E+11
Adjusted R-squared	0.840990	S.D. dependent var	1.35E+11
S.E. of regression	5.38E+10	Akaike info criterion	52.34781
Sum squared resid	2.37E+23	Schwarz criterion	52.59614
Log likelihood	-2372.825	Hannan-Quinn criter.	52.44800
F-statistic	60.50018	Durbin-Watson stat	0.960264
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran M**Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser**

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/17 Time: 06:43
 Sample: 2003 2015
 Periods included: 13
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.21E+11	7.77E+10	2.839512	0.0057
PAD	0.128027	0.689194	0.185763	0.8531
DAU	0.153668	0.239968	0.640369	0.5237
BM	0.010286	0.414880	0.024793	0.9803

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.404246	Mean dependent var	3.25E+11
Adjusted R-squared	0.338051	S.D. dependent var	2.48E+11
S.E. of regression	2.02E+11	Akaike info criterion	55.00471
Sum squared resid	3.31E+24	Schwarz criterion	55.28062
Log likelihood	-2492.714	Hannan-Quinn criter.	55.11602
F-statistic	6.106896	Durbin-Watson stat	1.377614
Prob(F-statistic)	0.000002		

Lampiran N**Uji Cross-section Effect**

Kab_Banyuwangi	3.68E+12
Kab_Bondowoso	-2.53E+12
Kab_Jember	2.86E+12
Kab_Lumajang	1.29E+11
Kab_Probolinggo	5.76E+11
Kab_Situbondo	-1.96E+12
Kota_Probolinggo	-2.75E+12